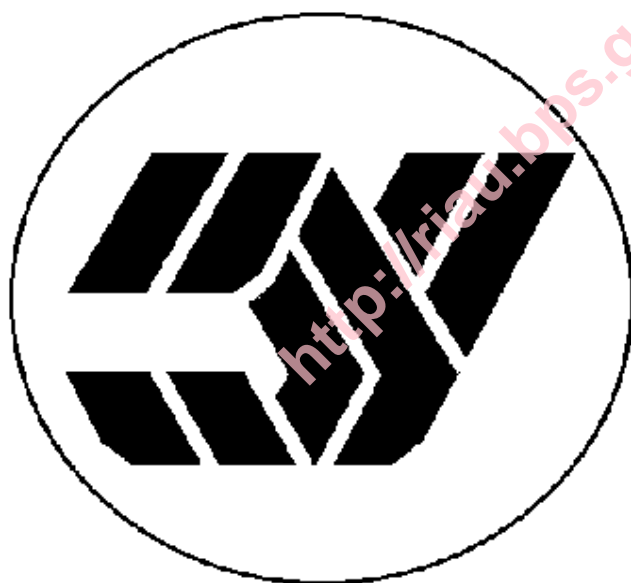




Katalog BPS: 9302006.14

PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2007 - 2011



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2007 - 2011

ISSN : 0126-4796
Nomor publikasi : 14.551.2012.10
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302006.14
Ukuran buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah halaman : 69 + vi

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://riau.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) akan selalu berupaya untuk dapat menyajikan informasi statistik yang berkualitas agar fenomena ekonomi yang terjadi pada tingkat regional dapat direkam dan disusun dalam indikator statistik yang baik. Melalui indikator statistik tersebut akan memudahkan penggambaran atas perkembangan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi.

Oleh karenanya, BPS merasa dibantu untuk secara periodik dapat menyajikan publikasi Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha tahun 2007-2011, yang menyajikan semua sektor ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai sektor jasa-jasa, dan merupakan hasil kerjasama antara BPS Provinsi Riau dengan Bappeda Provinsi Riau.

Untuk memudahkan pengguna publikasi ini, disajikan tabel-tabel nominal dan juga tabel-tabel turunannya seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan indeks harga implisit yang mengisyaratkan perkembangan harga masing-masing sektor secara lebih luas. Selain itu, disertakan pula penjelasan konsep, definisi, metodologi dan cara penghitungannya.

Mengingat masih belum sempurnanya publikasi ini, saya mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikannya, dan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terbit. Semoga penerbitan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, Juni 2012

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Kepala,

Drs. Mawardi Arsad, M.Si
NIP : 19560727 197903 1003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KEPALA BPS PROVINSI RIAU	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL ANALISIS	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
1.3. Konsep dan Definisi	6
1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks	6
1.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan	7
BAB II. URAIAN SEKTORAL	10
2.1. Sektor Pertanian	10
2.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian	12
2.3. Sektor Industri Pengolahan	13
2.4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	15
2.5. Sektor Bangunan	16
2.6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16
2.7. Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi	17
2.8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	20
2.9. Sektor Jasa-jasa	21
BAB III PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL	23
3.1. PDRB Tanpa Migas	25
3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	25
3.1.2. Kontribusi Sektoral	33
3.1.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	35
3.2. PDRB Dengan Migas	36
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	37

3.2.2. Kontribusi Sektoral	38
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita	41
BAB IV PERKEMBANGAN PDRB ANTAR DAERAH	43
PERKEMBANGAN PDRB SE-SUMATERA.....	43
4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	44
4.2. Kontribusi PDRB	46
4.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	48
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK	

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel	Halaman
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007 - 2011 (%)	32
3.1.2. Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2007 - 2011 (%) ...	34
3.1.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Tanpa Migas, 2007 - 2011 (Juta Rp)	36
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007 - 2011 (%)	37
3.2.2. Distribusi PDRB Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2007 - 2011 (%) ..	38
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Dengan Migas, 2007 - 2011 (Juta Rp)	42
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007 - 2011 (%)	45
4.1.2. Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku, 2007 - 2011 (%)	47
4.1.3. PDRB Per Kapita Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera, 2007 - 2011 (Juta Rp)	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2007 - 2011 (%)	26
3.2. Distribusi Persentase PDRB Riau atas Dasar Harga Berlaku, 2011	40

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2007-2011 (Juta Rupiah)	51
2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2007-2011 (Juta Rupiah)	52
3. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	53
4. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	54
5. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	55
6. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	56
7. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	57
8. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	58
9. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	59
10. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	60
11. Indeks implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha, 2007-2011	61
12. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011	62
13. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007-2011	63
14. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011	64
15. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007-2011	65

1

Pendahuluan

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Tujuan dan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pertumbuhan (*growth*) saja, melainkan juga perubahan pada tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tatanan sosial ekonomi yang dimaksud seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, peningkatan kesempatan kerja, dan perubahan pola konsumsi serta distribusi pendapatan.

Perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, secara langsung atau tidak langsung telah banyak membawa dampak perubahan pada sektor ekonomi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Peristiwa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997-1998 serta sejak pelaksanaan otonomisasi daerah tahun 1999, telah banyak memberi dampak kepada perubahan dan kemajuan di daerah khususnya Provinsi Riau. Untuk memantau dan mengukur perkembangan ekonomi daerah tersebut, tentu memerlukan beragam informasi

statistik yang akurat dan bermanfaat bagi pembuat keputusan (*decision maker*), baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat diikuti dan dicermati dengan seksama. Oleh karenanya, sejak tahun 2005, BPS Provinsi Riau telah melakukan perubahan tahun dasar, dari semula tahun 1993 menjadi tahun 2000, untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Beberapa alasan untuk melakukan perubahan ke tahun dasar baru karena:

- a) Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat. Perkembangan ekonomi nasional, regional, dan lokal dewasa ini makin bergeser ke sektor-sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi.
- b) Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi, debirokratisasi, dan otonomi daerah.
- c) Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana teruang dalam buku panduan yang baru "Sistem Neraca Nasional", dinyatakan bahwa penghitungan PDB/PDRB atas

dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhir 0 dan 5. Hal ini juga sudah didukung oleh komitmen para pimpinan BPS se-negara Asean untuk menetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasar baru. Sehingga, berbagai alasan diatas mengarah kepada kesimpulan untuk mema-kai tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar yang baru.

- d) Karena cakupan terus disempurnakan, dalam jangka waktu tujuh tahun telah terjadi perubahan struktur ekonomi dan ditambah dengan berbagai jenis komoditas baru serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Per-baik-an cakupan terutama di sektor pertanian. Perubahan proses komoditas umumnya terjadi di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika). Di sisi lain juga terjadi perubahan dalam komposisi harga antara sektor primer, sekunder, dan tersier.
- e) Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya juga akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian

Indonesia. Secara ringkas, bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah sangat berbeda dengan tahun 1993.

Dengan perekonomian Provinsi Riau yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, telah membawa dampak positif atas perkembangan kebutuhan barang dan jasa dan juga perkembangan ekonomi kewilayahan yang turut mengalami perubahan struktur ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru, banyak bermunculan disamping, komoditas yang lama tetapi dengan teknologi baru, seperti budidaya burung walet, produk telepon seluler, TV layar datar, dan sebagainya. Dengan demikian, angka penghitungan PDRB Riau dengan tahun dasar baru ini menjadi penting agar bisa menyajikan perkembangan ekonomi terkini dan lebih cermat.

Disamping itu, era otonomi daerah telah banyak memberikan perubahan bagi setiap komponen lembaga Pemerintah Daerah untuk melakukan secara mandiri penataan manajemen pembangunan secara lebih terarah dan terpadu sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Berbagai tingkat kinerja aktivitas pembangunan daerah di Provinsi Riau, baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan, disepakati untuk dapat terus dipantau dan dievaluasi dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau 2020.

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau tersebut salah satu kebutuhan informasi yang diperlukan adalah tentang informasi statistik, khususnya informasi perekonomian makro Provinsi Riau. Untuk keperluan itu, BPS Provinsi Riau telah berupaya melakukan penghitungan PDRB secara berkala. Melalui informasi PDRB ini, diharapkan dapat diketahui kondisi ekonomi makro Provinsi Riau, karena pada dasarnya PDRB merupakan realisasi jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di provinsi ini atas potensi sumber daya yang tersedia.

Penyajian angka PDRB biasanya dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang konstan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*) yakni tahun 2000.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Penyusunan publikasi *Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha, 2006-2010*, tetap mengacu kepada konsep, definisi, metodologi, cakupan, dan sumber data secara nasional. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan baik antarprovinsi maupun dengan nasional.

Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan/Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Sewa Bangunan, dan Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua komponen tersebut dijumlahkan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
4. Perubahan stok; dan
5. Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan

untuk faktor-faktor produksinya. PDRB yang telah diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Pada publikasi ini angka PDRB yang di-tampilkan adalah PDRB yang memakai pendekatan produksi. Di samping itu, beberapa indikator ekonomi penting lainnya dari angka PDRB dapat pula diturunkan, seperti:

1. Produk Regional Bruto, yaitu PDRB

ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu wilayah yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di suatu wilayah.

2. Produk Regional Neto atas dasar harga pasar, yaitu PDRB dikurangi dengan

seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

3. Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu Produk Regional

Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan Pajak Tidak Langsung Neto. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, Produk Regional atas dasar harga faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.

4. Angka-angka per Kapita, merupakan ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah.

1. Angka Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, dan begitu juga sebaliknya.

2. PDRN atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.

3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peran setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

5. PDRB atas dasar harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peran lembaga dalam penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

7. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

8. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan

PDRN setiap kepala atau per satu orang penduduk.

9. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 KONSEP DAN DEFINISI

Berikut ini dijelaskan istilah yang berhubungan dengan PDRB antara lain: output, biaya antara dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB. Selain hal tersebut, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penghitungan PDRB.

1.3.1 OUTPUT

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum produksi dan harganya.

1.3.2 BIAYA ANTARA

Biaya antara terdiri dari biaya yang dipakai habis untuk proses produksi (*intermediate input*). Biaya-biaya ini merupakan biaya untuk barang tidak tahan lama dan jasa yang habis digunakan di dalam proses produksi oleh unit-unit produksi domestik

dalam rentang waktu tertentu biasanya satu tahun.

1.3.3 NILAI TAMBAH BRUTO

Nilai Tambah Bruto merupakan selisih antara output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian konsep nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain merupakan penjumlahan seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi pada wilayah tertentu dan dalam rentang waktu tertentu.

1.4 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS

PDRB, seperti yang telah diuraikan, secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu. Kedua bentuk penyajian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, dan dalam publikasi ini harga konstan didasarkan kepada harga pada tahun 2000. Karena menggunakan harga tetap, perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata di sebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu: indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- **Peran Sektoral** diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Dalam penyajiannya, peranan sektor diberi judul tabel: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.
- **Indeks Perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.

- **Indeks Berantai** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikali dengan 100 dan hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat atau laju pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral.
- **Indeks Harga Implisit** diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dihitung indeks berantainya dengan rumus indeks berantai, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah penghitungan PDRB.

1.5 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Pendapatan regional atas dasar harga konstan 2000 sangat penting untuk melihat

perkembangan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan PDRB secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) ataupun komponen penggunaan PDRB. Pada dasarnya dikenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan. Masing-masing cara tersebut diuraikan berikut ini.

1.5.1 Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000, dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan karena mencakup komponen yang terlalu banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan 2000 biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan 2000 masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.5.2 Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi, seperti: Jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah atas dasar harga konstan yang sama. Ratio tersebut diperoleh dari survei khusus (SKPR) dan Tabel Input-Output Riau 2001.

1.5.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

1.5.4 Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya; selanjutnya nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya

antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produksi atau Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan 2000, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

<http://riau.bps.go.id>

2

Uraian Sektoral

<http://www.bps.go.id>

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan subsektor, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber data yang digunakan.

2.1 SEKTOR PERTANIAN

2.1.1 Ruang Lingkup

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Termasuk dalam kegiatan ini:

Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Yaitu meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian dan tanaman bahan makanan lainnya.

Subsektor Tanaman Perkebunan

Yaitu meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan, baik yang diusahakan

rakyat maupun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Adapun komoditas yang dihasilkan seperti: cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh, serta tanaman perkebunan lainnya.

Subsektor Peternakan

Yaitu meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditas hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, sarang burung walet serta hewan peliharaan lainnya.

Subsektor Kehutanan

Yaitu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditas hasil kehutanan di antaranya adalah kayu gelondongan, baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya, kayu bakar, rotan, arang, bambu, kopal, menjangan, babi

hutan, dan hasil hutan lainnya seperti madu lebah hutan, sarang burung walet hutan.

Subsektor Perikanan

Yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditas perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

2.1.2 Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Secara umum, nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara seluruh produksi yang dihasilkan terhadap harga produsennya.

NTB suatu subsektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditas. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya antara, yang dalam prakteknya biasa juga dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000, digunakan metode revaluasi, yaitu suatu metode yang menilai seluruh faktor produksi dan

biaya-biaya antara berdasarkan harga tahun 2000.

Khusus untuk subsektor peternakan, penghitungan produksi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2.1.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penyusunan output dan NTB sektor pertanian adalah data produksi, harga, dan rasio NTB.

Data produksi Tanaman Bahan Makanan bersumber dari BPS dan Dinas Tanaman Pangan, data perkebunan dari Dinas Perkebunan, data peternakan dari BPS dan Dinas Peternakan, data kehutanan dari Dinas Kehutanan, dan data perikanan bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Data harga untuk tiap-tiap komoditas selain bersumber dari BPS Provinsi Riau, juga diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Rasio NTB terhadap output didasarkan pada hasil yang disajikan dalam Publikasi Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor ini mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas, yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut.

2.2.1 Ruang Lingkup

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu: pertambangan migas, pertambangan tanpa migas dan penggalian.

Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Kegiatan ini menghasilkan minyak bumi, kondensat dan gas bumi. Pada penghitungan seris 2000,

cakupan komoditas subsektor ini bertambah dengan adanya uap panas bumi.

Subsektor Pertambangan Non Migas

Meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil kegiatan ini berwujud batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, fero nikel, nikel mattes, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium, fosfat, aspal alam, serta komoditas lainnya.

Subsektor Penggalian

Mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan bumi. Hasil kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan sebagainya.

2.2.2 Metode Estimasi

Untuk memperoleh estimasi output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku, dilakukan perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output di masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan di masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Lalu, melalui perkalian antara output tersebut dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

2.2.3 Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penghitungan sektor ini adalah data produksi diperoleh dari BPS, perusahaan pertambangan/penggalian dan Dinas Pertambangan. Data harga diperoleh dari BPS dan perusahaan penggalian. Rasio NTB terhadap output diperoleh dari Publikasi Tabel Input-Output Indonesia 2000 dan Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 (tiga) subsektor yaitu:

- a) Industri pengilangan minyak bumi,
- b) Industri pengolahan non-migas, dan
- c) Industri pengilangan gas alam cair (LNG)

Untuk industri non-migas dirinci lagi menjadi industri non-migas besar/sedang,

non-migas kecil, dan kerajinan rumah tangga.

2.3.1 Ruang Lingkup

Industri Pengilangan Minyak Bumi

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru.

Industri Non-migas Besar/Sedang

Dalam penghitungan seri baru ini (2000=100) dengan seri lama (1993=100) tetap mengacu kepada pembagian kelompok subsektor Industri Besar Sedang (IBS) pada KLUI 2 dijit yakni menjadi 9 (sembilan) kelompok, seperti:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumahtangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Subsektor ini sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar/Sedang Non-migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Industri Kerajinan Rumah Tangga jika jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang.

Menurut kegiatan utama yang dihasilkan, kegiatan subsektor IKKR dikelompokkan menjadi sembilan kelompok komoditas, yaitu:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah tangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Pengilangan Gas Alam Cair (LNG)

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru, karena disamping komoditasnya tunggal (LNG), produknya juga hanya ada di beberapa tempat yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.2 Metode Estimasi

Dalam penghitungan subsektor industri pengolahan non-migas besar/sedang digunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu. Kemudian, output dikurangi dengan biaya antara menghasilkan nilai tambah bruto. Untuk mendapatkan NTB atas dasar harga konstan dipakai metode deflasi dimana output dan jumlah tenaga kerja digunakan sebagai deflator.

Untuk penghitungan subsektor pengilangan minyak menggunakan pendekatan produksi seperti halnya industri pengolahan non migas, sedangkan untuk harga konstan digunakan cara revaluasi.

Sedangkan untuk subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga penghitungan output dan NTB-nya menggunakan pendekatan tenaga kerja, yang dihitung secara rinci menurut kegiatan industri yang dikelompokkan dalam 3 digit KLUI. Untuk menghitung NTB atas dasar harga konstan

menggunakan metode deflasi, dan sebagai deflatornya adalah jumlah output dan tenaga kerja.

2.3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan sektor ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

1. Tabel Input-Output Indonesia (BPS)
2. Publikasi Tahunan Statistik Industri Besar/Sedang (BPS)
4. Publikasi Indikator Ekonomi (BPS)
5. Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (BPS)
6. Publikasi Tahunan Pertambangan dan Energi, Deptamben.
7. Publikasi Tahunan Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi (BPS)

2.4 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2.4.1 Ruang Lingkup

Subsektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) maupun oleh perusahaan Non-PLN, dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

Subsektor Air Bersih

Kegiatan subsektor air minum mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.

2.4.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan subsektor listrik menggunakan pendekatan produksi. Output dan NTB subsektor ini diperoleh dari penjumlahan output/NTB dari PLN dan Non-PLN.

Untuk penghitungan subsektor air bersih menggunakan pendekatan produksi, dimana output dan NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi.

2.4.3 Sumber Data

Data produksi, harga dan biaya antara subsektor listrik untuk PLN diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Riau, sedangkan untuk perusahaan listrik Non-PLN dari Dinas Pertambangan, data sekunder dan SKPR.

Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air

minum diperoleh dari hasil survei tahunan Perusahaan Air Minum.

2.5 SEKTOR BANGUNAN

2.5.1 Ruang Lingkup

Pada umumnya kegiatan sektor ini terdiri atas bermacam kegiatan yang meliputi: pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan tersebut dapat dirinci menurut standar KLUI.

Sektor bangunan terbagi 5 bagian yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal, Prasarana Pertanian, Jalan-Jembatan-Pelabuhan, Bangunan Instalasi Listrik-Gas-Air Minum dan Komunikasi, serta bangunan lainnya.

2.5.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan sektor bangunan menggunakan pendekatan pendapatan untuk NTB atas dasar harga berlaku, dan metode deflasi untuk penghitungan atas dasar harga konstan.

2.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan didapat dari hasil SUSENAS Riau, Publikasi AKI dan Publikasi Non-AKI, serta Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia.

2.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.6.1 Ruang Lingkup

Subsektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam penghitungannya kegiatan ini dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas.

Subsektor Hotel

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak, serta tempat tinggal lainnya yang di-

gunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap di mana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan.

Subsektor Restoran

Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, katering, dan kantin.

2.6.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan menggunakan metode arus barang (*commodity flow*), sedangkan untuk sub sektor hotel menggunakan metode estimasi dengan pendekatan produksi. Dan untuk sub sektor restoran menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah.

Untuk penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan untuk sektor ini dihitung masing-masing dengan metode revaluasi dan atau deflasi.

2.6.3 Sumber Data

1. Publikasi Susenas dan pola konsumsi Provinsi Riau.
2. Publikasi Direktori Hotel Riau.
3. Publikasi tingkat penghunian kamar malam hotel Riau.
4. Buletin Ekonomi BPS.
5. Data sekunder dan SKPR.

2.7 SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

2.7.1 Ruang Lingkup

Subsektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor pengangkutan terdiri dari atas Jasa Angkutan Jalan Raya, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan Jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan.

Angkutan Jalan Raya meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk di sini kegiatan lainnya seperti carter/sewa kendaraan baik dengan

atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dengan kegiatan ini seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan.

Angkutan Laut meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya, dan disamping itu data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan. Misalnya tangker-tangker yang diusahakan oleh Pertamina untuk angkutan di dalam negeri, kapal milik perusahaan penangkapan ikan dan angkutan khusus lainnya.

Angkutan Udara meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit untuk dipisahkan, seperti EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain, baik untuk angkutan penerbangan dalam negeri maupun angkutan penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang

dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum.

Jasa Penunjang Angkutan mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat, terminal dan parkir, bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol, dan jasa penunjang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut.

Subsektor Komunikasi

Subsektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimile, dan telex yang diusahakan oleh antara lain PT Telekomunikasi, PT Excelcomindo, dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), dan telepon seluler (ponsel).

2.7.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor angkutan jalan raya atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil SKPR sektor angkutan, serta data sekunder kecamatan.

Penghitungan nilai tambah subsektor angkutan laut dilakukan melalui pendekatan alokasi dari angka nasional subsektor angkutan laut, karena kegiatan angkutan laut merupakan kegiatan multiregional, di mana kegiatannya bisa sekaligus merupakan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan milik nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional.

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks angkutan/transpor. Kemudian, nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor angkutan udara diperoleh dari laporan tahunan tiap bandar udara. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan cara deflasi.

Nilai tambah subsektor jasa penumpang angkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi,

bongkar-muat, pergudangan diperoleh dari SKPR. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.

Subsektor komunikasi mencakup jasa pos dan giro, serta telekomunikasi. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan PT. POSINDO. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 memakai metode ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim.

Penghitungan nilai tambah subsektor telekomunikasi atas dasar harga berlaku berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Riau. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit percakapan lokal/interlokal.

2.7.3 Sumber Data

1. Dinas Perhubungan Riau.
2. Data SKPR.
3. Data Sekunder.
4. Kandatel Riau Daratan.

2.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Secara garis besar sektor ini terbagi atas 3 kelompok kegiatan utama yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, serta usaha persewaan bangunan dan tanah. Namun, dalam klasifikasi tahun dasar 2000 sektor bank dan lembaga keuangan lainnya berubah menjadi Sektor Keuangan, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

2.8.1 Ruang Lingkup

Subsektor bank, meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank non BI (bank umum pemerintah dan bank umum swasta) dan BPR. Subsektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya, mencakup juga koperasi, KUD dan Non KUD, pegadaian dan dana pensiun. Kemudian, subsektor jasa penunjang keuangan mencakup pedagang valuta asing, pasar modal dan sebagainya.

2.8.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah asuransi atas dasar harga berlaku diperoleh melalui SKPR dan data sekunder. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara metode deflasi, juga dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah Koperasi berasal dari data SKPR. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi, dan deflatornya adalah IHK Umum.

Nilai tambah subsektor sewa bangunan baik untuk tempat tinggal dan bukan, diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antaranya. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi, sebagai deflatornya adalah IHK Umum.

Selain subsektor tersebut, subsektor jasa penunjang keuangan, seperti pedagang valas, dihitung dengan cara yang sama seperti subsektor asuransi maupun koperasi.

2.8.3 Sumber Data

1. Publikasi/Laporan Tahunan BI
2. Publikasi IHK
3. Data Sekunder dan SKPR

2.9 JASA - JASA

Sektor ini mencakup subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta. Subsektor pemerintah umum meliputi pemerintahan dan hankam, sedangkan subsektor jasa swasta meliputi subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, jasa perorangan dan rumah tangga.

2.9.1 Ruang Lingkup

Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/Akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Jasa kesehatan oleh swasta seperti: rumah sakit, rumah bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyarakatan lainnya seperti panti asuhan dan panti jompo. Terakhir jasa lainnya, adalah jasa yang tidak termasuk dalam cakupan di atas namun masih tergolong dalam sub-sektor jasa sosial dan kemasyarakatan.

Subsektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya.

Subsektor jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan perbengkelan (mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik), dan jasa perorangan (tukang binatu, salon, tukang semir, tukang jahit dan sebagainya).

2.9.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor pemerintahan dan hankam terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan.

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri. Penghitungan nilai tambah subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan atas dasar harga berlaku melalui pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara/metode ekstrapolasi.

Penghitungan nilai tambah subsektor jasa hiburan dan kebudayaan atas dasar harga berlaku juga melalui pendekatan produksi. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa. Kemudian untuk penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor jasa perorangan dan rumah tangga juga melalui pendekatan produksi, sekaligus penghitung-

an nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.. Sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa.

2.9.3 Sumber Data

1. Data belanja pegawai pusat dan ABRI dari BPS.

2. Data belanja Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari BPS.
3. Data sekunder dan SKPR.
4. Data Podes SP/ST/SE.
5. Publikasi IHK

<http://riau.bps.go.id>

3

Perkembangan PDRB

Sektoral

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB RIAU

Pembangunan bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan sendiri merupakan rangkaian proses ikhtiar yang terencana, terpadu, bertahap dan berkesinambungan menyangkut berbagai bidang.

Kebijakan otonomisasi merupakan bagian dari tujuan pembangunan bangsa yang pada hakekatnya guna memacu kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini perbaikan masih terus diperlukan, salah satu yang sangat didambakan adalah kebutuhan keterpaduan pembangunan yang bersinergi baik antar skala nasional dengan regional atau inter regional.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara awam dikatakan perlu pendapatan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan atau meningkatkan standard kualitas hidup masyarakat yang jumlahnya meningkat (Daryono, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja

perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan PDRB Riau merupakan gambaran perekonomian Provinsi Riau. Unsur migas sangat mempengaruhi struktur PDRB Riau, sehingga perekonomian Riau tanpa migas akan sangat berbeda dengan struktur perekonomian bila memasukkan unsur migas.

Peranan migas dalam perekonomian nasional cenderung terus mengecil sehingga mendongkrak besaran peranan dari sektor selain migas. Mengecilnya peranan migas sangat mempengaruhi perekonomian nasional, sehingga khusus untuk provinsi-provinsi penghasil migas berpeluang mengalami hal yang sama.

Dalam kurun waktu 2007-2011 terjadi beberapa kali kenaikan harga minyak dunia, sementara tingkat pertumbuhan produksi tidak dapat mengimbangi percepatan kebutuhan sehingga memaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi pada akhir tahun 2005. Selama tahun 2006, dampak kenaikan BBM masih mempengaruhi setiap aktivitas ekonomi nasional.

Situasi perekonomian mulai terkendali di saat tahun 2007, pengaruh dari dampak kenaikan BBM pada tahun 2005 sudah mulai sirna seiring dengan penyesuaian keseimbangan proses produksi dari setiap aktivitas ekonomi yang secara simultan telah mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan biaya produksi dengan tingkat produksi sehingga kondisi perekonomian mulai berkembang semakin kondusif.

Kemudian selama tahun 2008 kembali terjadi peristiwa yang sama yakni kenaikan harga minyak kedua dipasaran dunia yang mulai terasa dari awal tahun 2008 sehingga tiada pilihan lain pihak pemerintah kembali melakukan kebijakan kompensasi harga BBM.

Seiring dengan itu terjadi juga percepatan kenaikan harga sawit bermula pada akhir tahun 2007, kemudian dalam perjalanan waktu ke depan terus meningkat dan hingga menduduki puncak harga yang sempat menembus di atas 1.600 rupiah per kilonya sebelum memasuki triwulan ke empat tahun 2008.

Sangat ironis, pada akhir triwulan ke tiga (memasuki triwulan ke empat) tahun 2008, secara bersamaan terjadi krisis global yang diiringi pula oleh mulai bergerak anjloknya harga sawit hingga menyentuh titik terendah berkisar 250 rupiah per kilogramnya. Titik terendah ini terjadi dalam masa tahun 2009.

Berbekal pengalaman pada saat penanganan menghadapi krisis pada masa lalu, pemerintah dengan sigap bersama seluruh komponen yang terlibat dalam perekonomian bersinergi secara simultan menyikapi peristiwa tersebut. Hasilnya cukup menggembirakan bagi pihak karena perkembangan ekonomi masih bertahan dan berjalan cukup baik ditandai dengan tingkat laju pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi Riau dapat bertahan cukup baik, mulai dari mencermati pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2005, ternyata perekonomian tahun 2006 dan 2007 Riau berjalan baik yang tercermin dari tingkat pertumbuhan berada di atas 8 persen. Ketangguhan daya beli masyarakat Riau yang begitu kokoh, terutama ber-sumber dari subsektor perkebunan ternyata sangat berperan besar memutar roda perekonomian di Riau sehingga dapat bertahan dan dengan cepat menyesuaikan kondisi ekonomi yang terjadi.

Kemudian tentang kondisi perekonomian tahun 2008, meskipun secara bersamaan gelombang krisis global dan mulai anjloknya harga sawit melanda kehidupan masyarakat Riau namun masih memposisikan laju pertumbuhan Riau di atas 8 persen, mengingat peristiwa tersebut terjadi pada akhir tahun 2008.

Berikutnya secara otomatis situasi perekonomian Riau selama tahun 2009

sudah barang tentu dipengaruhi oleh kondisi krisis global dan krisis harga sawit tersebut. Sekali lagi, oleh karena perekonomian Riau masih kuat bertahan dan terbukti laju pertumbuhan yang diraih masih berada di atas 6 persen dan hal ini masih dikategorikan baik bila melihat kondisi perekonomian global selama tahun 2009 yang sangat terpuruk.

Selanjutnya situasi perekonomian Provinsi Riau semakin berkembang baik selama tahun 2010 dan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah tumbuh berada di atas 7 persen.

Secara umum perekonomian Riau tanpa migas selama tahun 2010 masih ditandai dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, pertambangan tanpa migas, keuangan, bangunan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini berlanjut sampai dengan tahun 2011

Selanjutnya perekonomian Riau dengan migas, subsektor minyak dan gas mengalami fluktuasi tingkat pertumbuhan yang merupakan imbas dari gejolak harga minyak dunia. Tingkat pertumbuhannya berkaitan erat dengan ketidakstabilan tingkat produksi yang terjadi. Dan pada tahun 2011 pergerakan harga minyak masih berlangsung. Sehingga efeknya akan sangat mempengaruhi pembentukan PDRB. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan PDRB dengan migas Provinsi Riau selama tahun 2007-2011

berturut-turut dari tahun 2007 3,41 persen, 5,65 persen, 2,97 persen, 4,18 dan terakhir tahun 2011 sebesar 5,01 persen.

Perkembangan aktivitas ekonomi Riau selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci dan terpisah antara PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas. Dari gambaran secara terpisah ini, dapat diketahui perkembangan perekonomian serta peran masing-masing sektor terhadap perekonomian Riau baik dengan migas maupun tanpa migas.

3.1 PDRB Riau Tanpa Migas

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

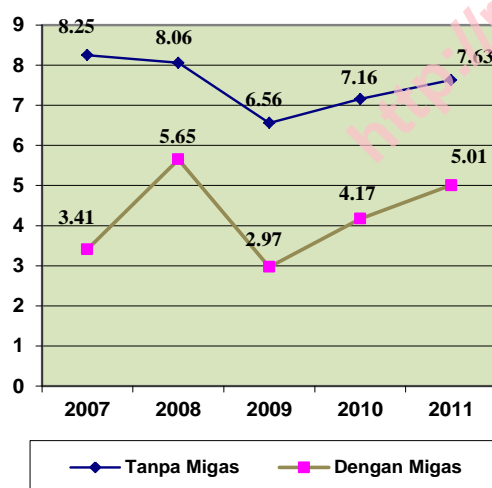
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk menilai hasil pembangunan. Sangat disarankan dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan arah kebijakan sebaiknya dapat memakai indikator tersebut.

Selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2007-2011, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berjalan stabil meskipun yang paling dominan mempengaruhi roda perekonomian Riau adalah dampak dari anjloknya harga sawit yang sempat menyentuh titik yang paling terendah bermula di saat akhir tahun 2008. Hal ini disebabkan perekonomian tanpa migas masyarakat Riau sangat terfokus pada agroindustri.

Bersamaan dengan itu juga terjadi krisis perekonomian global, namun oleh karena peristiwa tersebut terjadi mulai beberapa saat sebelum triwulan ke empat maka secara umum tidaklah begitu mempengaruhi perkembangan ekonomi Provinsi Riau selama tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi selama satu tahun 2008 masih dapat bertahan di delapan persen seperti tahun-tahun sebelumnya. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 sebesar 8,25 persen, di tahun 2008 sebesar 8,06 persen, tahun 2009 sebesar 6,56 persen, tahun 2010 sebesar 7,16 persen dan tahun 2011 sebesar 7,63 persen.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2007-2011 (%)



Pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2011 tercatat sebesar 7,63 persen. Selama tahun ini Eropa terkena krisis keuangan namun tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan Riau

secara khusus. Hal ini terbukti neraca perdagangan Indonesia dan Riau dengan negara-negara Eropa mengalami surplus. Dan dampak dari penetapan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII juga memberi sentuhan positif pada pergerakan ekonomi di Riau. Secara rinci pada triwulan pertama 2011 terhadap triwulan yang sama tahun 2010 (*yon y*) tumbuh sebesar 7,82 persen, kemudian triwulan ke dua dan tiga tumbuh sebesar 7,71 persen dan 7,64 persen. Selanjutnya pada triwulan ke empat mulai bangkit dan tumbuh sebesar 7,40 persen

Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2011 sangat berkaitan erat dengan hasil kinerja secara sektoral yang baik. Secara sektoral pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor bangunan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Persiapan Riau sebagai tuan rumah PON ke-18 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sangat mewarnai perekonomian Riau. Terlihat pertumbuhan sektor bangunan sangat dominan pada tahun ini. Semakin bergairah kemajuan berusaha menurut sektoral dalam perekonomian berdampak kondusif terhadap perkembangan sektor bangunan. Sektor bangunan pada umumnya berkaitan erat dengan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.

Kemajuan perekonomian memicu percepatan pendapatan terhadap faktor produksi berupa pendapatan dari tenaga

kerja, sehingga tercipta daya beli yang mengakibatkan melambungnya permintaan akan bangunan tempat tinggal, baik berupa permintaan baru maupun renovasi dan bahkan bertujuan untuk investasi.

Animo masyarakat Riau cukup tinggi untuk memiliki bangunan tempat tinggal menggunakan jasa berbagai developer perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Untuk memenuhi respon permintaan konsumen yang tergolong berkemampuan ekonomi menengah ke atas, saat ini telah menjamur cluster perumahan mewah. Kondisi ini banyak terdapat pada segmen daerah perkotaan.

Berikutnya pada sisi pembangunan bukan tempat tinggal sangat banyak sekali pemicu perkembangannya seperti dari sudut kebijakan pemerintah atau dari sudut kebutuhan pengembangan usaha dari pihak swasta.

Program pembangunan infrastruktur multiyears masih terus berlangsung, diantaranya pembangunan akses jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten/kota se Provinsi Riau. Demikian juga untuk wilayah kabupaten/kota selain akses jalan penghubung antar kecamatan dan desa/kelurahan juga terus berpacu membangun jembatan baik skala kecil

hingga multiyears dengan tujuan agar dapat meningkatkan frekwensi dan memangkas efisiensi roda perekonomian wilayahnya masing-masing.

Kemudian tidak ketinggalan juga selama tahun 2009 telah dimulai juga pembangunan sarana dan prasarana persiapan menyambut Pekan Olah Raga Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Riau pada tahun 2012. Seperti pembangunan sarana penunjang PON seperti *venue-venue* untuk cabang olahraga yang dipertandingan, rusunawa dan sarana pendukung lainnya menjadi penyumbang utama sektor bangunan.

Kemajuan berusaha pihak swasta dari berbagai sektor ekonomi turut berperan besar terhadap pertumbuhan sektor bangunan. Selama tahun 2009 sarana bisnis berupa pusat perbelanjaan (*mall*) dan pembangunan menyeluruh beberapa pasar tradisional agar lebih moderen. Masih pada sektor yang sama semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perkantoran berupa ruko dan semakin tumbuh sumburnya kompleks pertokoan berupa ruko. Pembangunan hotel berbintang dan telah beroperasi serta saat ini telah dibangun juga rumah sakit swasta yang berskala internasional turut mendongkrak pertumbuhan sektor bangunan.

Perjalanan laju pertumbuhan sektor bangunan selama tahun 2007-2011

berturut-turut sebagai berikut: dari tahun 2007 11,65 persen, 11,14 persen, 8,77 persen, 8,84 persen dan selama tahun 2011 sebesar 12,77 persen.

Perkembangan sektor perdagangan di Riau sangat menjanjikan, berbagai aspek sangat mendukung hal tersebut, diantaranya adalah kemampuan daya beli masyarakat Riau cukup baik yang bersumber dari agroindustri. Prasaran usaha terus berkembang pesat. Pembangunan rumah toko (ruko) menjamur di setiap lokasi bisnis baru. Baik lokasi bisnis di areal perkotaan maupun non perkotaan, bahkan pada jalur lintas antar kota bila berpeluang menjadi lokasi bisnis juga tumbuh pesat pembangunan ruko baru.

Selama tahun 2011 laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tercatat sebesar 10,09 persen merupakan hasil kinerja dari subsektor perdagangan yang tumbuh sebesar 10,13 persen, subsektor hotel sebesar 8,52 persen dan subsektor restoran sebesar 9,12 persen.

Salah satu pemicu subsektor perdagangan adalah semakin bersemaraknya transaksi jual beli barang dan jasa khususnya barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor. Khusus memacu efisiensi kinerja dan mengimbangi permintaan para konsumen

dan peningkatan mutu pelayanan untuk merk kendaraan bermotor Honda, Yamaha, Suzuki sejak tahun 2008 telah mengoperasikan perwakilan dan gudang penampung stok kendaraan yang sangat representatif. Besarnya jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke Riau berkorelasi positif mendorong naiknya transaksi perdagangan. Begitu juga peningkatan permintaan kendaraan roda empat dari berbagai merk sangat tinggi, apakah itu digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun keperluan usaha, terbukti semakin banyak tumbuh baru show room mobil di berbagai tempat guna memenuhi permintaan para konsumen.

Sementara itu subsektor hotel berkembang cukup baik, mulai dari hotel melati yang memanfaatkan ruko-ruko hingga hotel bintang lima seperti Labersa Hotel yang telah beroperasi pada awal tahun 2009. Perkembangan hotel ini sejalan dengan permintaan pasar yang terus meningkat sehingga turut memberi pengaruh terhadap penciptaan nilai tambah subsektor hotel. Selanjutnya peningkatan permintaan berbagai jenis makanan yang diiringi dengan semakin kuatnya daya beli sebagian masyarakat masyarakat Riau telah turut memacu peningkatan subsektor restoran.

Kemudian laju pertumbuhan tertinggi ke tiga terjadi pada sektor pertambangan non migas terutama karena

tingginya kontribusi tingkat produksi batu bara. Meskipun tinggi namun tingkat produksinya cenderung merendah terlihat pada laju pertumbuhan sektor setiap tahun dalam kurun waktu 2007-2011 secara berurutan dari tahun 2007 tumbuh 40,70 persen, 27,48 persen, 17,33 persen, 9,11 persen dan tahun 2011 sebesar 9,31 persen.

Eksplorasi pertambangan batu bara masih tergolong baru bila dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, untuk itu kemandiriannya masih perlu terus dibina oleh para pemangku kebijakan. Faktor utama kemandiriannya sangat tergantung pada cadangan potensial batu bara yang tersedia untuk dieksploitasi. Bila kenyataan dilapangan ternyata cadangan potensial batu bara melimpah maka diharapkan di masa depan alangkah lebih baik memformulakannya agar menjadi salah satu komoditas primadona Riau selain minyak bumi. Selain berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, berikutnya mulai tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hilir telah mulai memproduksi batu bara juga.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi ketiga dan keempat terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sebesar 9,73 persen dan 9,67 persen. Laju pertumbuhan yang diperoleh tersebut tidak terlepas dari penjabaran sebelumnya yakni oleh karena tersedianya

prasarana yang merupakan hasil dari program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga membuka serta memperlancar akses transportasi ke segenap wilayah di Provinsi Riau. Sejalan dengan hal tersebut sarana transportasi cukup memadai yang terindikasi melalui permintaan mobil pada sektor perdagangan sebagai alat transportasi darat meningkat pesat, khususnya rental mobil dan travel antar daerah. Selain angkutan manusia ada juga angkutan barang. Usaha pengiriman barang berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan pendistribusian barang ke setiap pelosok oleh karena perekonomian wilayah tersebut juga semakin maju dan berkembang.

Mulai awal tahun 2009, pemerintah Kota Pekanbaru langsung mengelola dan telah meluncurkan kebijakan pengoperasian trayek angkutan murah dalam kota guna melayani kebutuhan masyarakat.

Berhubungan dengan kondisi di atas maka subsektor angkutan darat menciptakan laju pertumbuhan sebesar 7,91 persen.

Kemudian kenyamanan dalam berusaha, stabilitas keamanan daerah Riau yang kondusif dan didukung oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan, prasarana dan sarana angkutan udara menjadi pendorong tingginya aktivitas di

subsektor ini. Mulai akhir tahun 2009 guna mengimbangi kebutuhan masyarakat dan agar lebih memobilisasi perekonomian telah mulai dilakukan pelaksanaan pembangunan fasilitas terminal bandar udara yang jauh lebih representatif bila dibandingkan dengan yang ada selama ini.

Pada sisi yang lain, menanggapi peningkatan kebutuhan masyarakat berkenaan menjaga efektivitas berbisnis maka para pebisnis sangat mendambakan jasa angkutan udara. Pihak maskapai penerbangan telah merespon dengan langkah menambah beberapa pesawat armada penerbangan dan membuka baru jalur penerbangan. Setelah semua terkondisi baik maka lengkaplah harapan dari percepatan peningkatan nilai tambah subsektor angkutan udara pasti semakin menjanjikan. Kemudian selama tahun 2011 subsektor angkutan udara memberi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,03 persen.

Sejalan dengan itu juga sarana dan prasarana subsektor angkutan laut juga berkembang cukup baik yang mana selama tahun 2011 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,47 persen.

Perkembangan subsektor komunikasi sangat maju pesat mengingat budaya masyarakat Riau sangat terbuka terhadap perkembangan kemajuan teknologi. Tingginya penggunaan telepon selular merupakan indikator bahwa komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar

selain sekedar sebagai *trendy* dalam berinteraksi sosial maupun berbisnis. Selain itu terjadi perubahan perilaku komunikasi yang mulai bergeser dari komunikasi suara ke komunikasi data

Penggunaan handphone saat ini telah menjamah seluruh lapisan masyarakat. Kemudian hal ini ditopang juga dengan semakin banyaknya *provider* sehingga harga pulsa menjadi bersaing melalui berbagai jenis kartu yang ditawarkan dan tanpa terasa frekwensi para konsumen pengguna telepon seluler mengkonsumsi pulsa semakin tinggi. Dengan demikian subsektor komunikasi telah menghasilkan laju pertumbuhan selama tahun 2011 sebesar 18,28 persen

Sementara pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didorong oleh subsektor bank yang meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi subsektor bank tahun 2011 cukup tinggi hingga mencapai 12,74 persen, sedikit lebih laju dari tahun yang lalu tercatat sebesar 12,45 persen.

Tingkat pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari situasi perekonomian tahun sebelumnya. Dalam perekonomian selama tahun 2009 sepenuhnya bersamaan dengan peristiwa krisis global, maka bila penerapan kebijakan dalam menyikapi krisis terhadap terhadap perekonomian tidak tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan maka akan berpeluang negatif

bagi perekonomian suatu wilayah. Pihak perbankan yang merupakan salah satu institusi menangani krisis masih senantiasa melaksanakan dan meningkatkan kebijakan yang baik pada masa sebelumnya yakni menyalurkan pemberian kredit kepada masyarakat khususnya sektor riil, hal ini selain bermanfaat sebagai proteksi terhadap krisis, juga guna memenuhi kepercayaan masyarakat karena menilik dari semakin terkendalinya tingkat kredit macet yang telah disalurkan ditengah semakin beragamnya kredit (terutama kredit konsumsi). Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator tingkat kemampuan konsumen yang terus membaik dan mampu mengimbangi tingkat suku bunga kredit.

Selain itu, tinggi pertumbuhannya juga didukung oleh perkembangan lembaga perbankan yang jumlahnya semakin tersebar merata dan keberadaannya telah menjangkau hingga ke pedesaan. Kondisi ini membuka lebar kemudahan bagi masyarakat Riau untuk mengakses jasa perbankan. Pada sisi yang lain, pihak perbankan semakin mempermudah persyaratan permohonan kredit agar para konsumen mempunyai alasan yang tepat menjustifikasi pilihannya menggunakan jasa perbankan dibandingkan dengan jasa peminjaman lainnya. Bermadankan sinergi yang telah terbangun baik ini mampu menjadi daya

tarik untuk memicu kinerja wirausaha para pebisnis swasta maupun masyarakat.

Berikutnya ada beberapa sektor selama tahun 2011 yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yakni tumbuh di atas 8 persen adalah sektor jasa-jasa sebesar 8,48 persen.

Bersamaan dengan sektor di atas, sektor jasa-jasa selama tahun 2011 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar sebesar 8,48 persen. Sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan jasa pemerintahan sebesar 8,33 persen dan jasa swasta sebesar 8,95 persen. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar secara proporsional akan berhubungan dengan peningkatan anggaran belanja barang pemerintah. Selain itu, pemberian tambahan tunjangan untuk pegawai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten signifikan meningkatkan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan. Sementara pertumbuhan subsektor jasa swasta disebabkan oleh peningkatan komoditas jasa sosial kemasyarakatan sebesar 8,59 persen, jasa hiburan dan rekreasi sebesar 9,27 persen, dan jasa perseorangan dan rumah tangga sebesar 8,94 persen.

Setelah sektor-sektor yang menghasilkan pertumbuhan di atas 8 persen berikutnya adalah sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan di bawah 8

persen seperti sektor industri pengolahan, listrik dan air bersih, dan sektor pertanian.

Laju pertumbuhan sektor industri tanpa migas selama tahun 2011, tercatat sebesar 8,09 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 7,67 persen. Kondisi kondusif tahun 2011 ini merupakan salah satu indikasi perekonomian sudah terlepas dari krisis global dan krisis anjoknya harga sawit yang bermula pada akhir tahun 2008.

Kepanikan perekonomian yang terjadi akibat dari krisis tidak berlangsung lama. Krisis global bersumber dari Amerika Serikat, sementara itu secara umum produk dari industri besar dan sedang dari Provinsi Riau tujuan ekspornya lebih dominan di luar dari Amerika Serikat maka pengaruh krisis global tidak berdampak fatal mempengaruhi perekonomian sektor ini. Sementara itu anjoknya harga sawit oleh karena dampak dari melemahnya permintaan CPO di pasar dunia tidak berlangsung lama dan dampaknya sangat dirasakan pada perekonomian tahun 2009 saja. Pada tahun 2010 ini terlihat nyata bahwa perekonomian sektor industri pengolahan mulai berkembang cukup baik.

Selain sektor industri pengolahan, sektor pertanian juga mengalami imbas dari anjoknya harga sawit, dimana tingkat produksi kelapa sawit menjadi rendah. Kondisi tingkat produksi melemah ini

sangat dirasakan dalam perekonomian hanya pada triwulan I tahun 2009 dan triwulan berikutnya mulai bangkit kembali meskipun secara rata-rata masih di bawah kondisi tahun 2008. Laju pertumbuhan subsektor perkebunan selama tahun 2009 tercatat sebesar 6,07 persen dan selama tahun 2010 tingkat produksi kembali membaik sehingga laju pertumbuhan perkebunan meningkat menjadi sebesar 7,38 persen. Tren positif ini terus berlanjut sampai tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 9,25 persen.

Tabel 3.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007-2011 (%)

Sektor	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	4,84	4,79	3,72	3,95	3,88
2. Pertambangan	24,57	18,13	13,23	9,73	13,18
3. Industri	11,41	8,98	6,36	7,67	8,09
4. Listrik dan air	5,62	6,86	3,17	5,59	6,85
5. Bangunan	11,65	11,14	8,77	8,84	12,77
6. Perdagangan	8,94	9,72	8,87	10,17	10,09
7. Angkutan	7,28	10,45	8,26	9,43	9,73
8. Keuangan	13,33	13,65	10,14	9,61	9,67
9. Jasa-Jasa	9,71	9,25	8,54	8,44	8,48
Total PDRB	8,25	8,06	6,56	7,16	7,63

Sumber: BPS Provinsi Riau

Kecenderungan pertumbuhan sektor pertanian yang terus melemah dari tahun ke tahun lebih dominan terpengaruh oleh perlambatan dari subsektor kehutanan. Dari tahun 2007

pertumbuhannya sebesar 2,21 persen dari tahun ke tahun semakin melemah. Pada tahun 2010 tercatat sebesar -0,97 persen dan terakhir hingga tahun 2011 terkoreksi sebesar -5,36 persen.

Melambatnya pertumbuhan pada subsektor kehutanan karena rendahnya tingkat produksi yang merupakan dampak dari adanya peraturan *illegal logging* dan kapasitas hutan yang tersedia sudah sangat menipis. Tingkat pertumbuhan di subsektor kehutanan hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau, program revitalisasi kehutanan selayaknya lebih giat dan gencar dicanangkan dan menjadi salah satu agenda utama.

Sehingga secara umum perjalanan laju pertumbuhan sektor pertanian bila dilihat mulai tahun 2007 tercatat sebesar 4,84 persen, kemudian terus cenderung melemah pada setiap tahun berikutnya. Selama tahun 2010 sebesar 3,95 persen dan tahun 2011 tercatat sebesar 3,88 persen.

Terakhir adalah sektor listrik dan air memiliki pertumbuhan paling kecil yakni sebesar 6,85 persen, setahun yang lalu pada tahun 2009 tumbuh sebesar 3,17 persen dan sempat tumbuh sebesar 6,86 persen pada tahun 2008. Semakin cepat roda perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu mengharuskan dunia usaha dan masyarakat mendongkrak tingkat kebutuhan akan energi listrik dan

air. Sektor ini belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut oleh karena keterbatasan sumber daya yang dihasilkan. Akibatnya secara series sektor ini pertumbuhannya semakin lama cenderung melemah. Ini merupakan konsekuensi dari tingginya percepatan perekonomian yang tidak diiringi oleh tingginya investasi pembangunan pembangkit listrik. Pada saat ini kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan dari perekonomian. Untuk itu dimasa mendatang sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasi krisis energi ini.

3.1.2 Kontribusi Sektoral

Struktur ekonomi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total perekonomian di Riau. Melalui kontribusi ini maka kita dapat mengukur seberapa besar kemampuan daya ungkit (*leverage*) dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pada Tabel 3.1.2 tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas Riau pada tahun 2011 masih didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan yang ketiganya memberikan kontribusi sebesar 73,70 persen, dimana peran masing-masing adalah sebesar 30,78 persen, 27,03 persen, dan 15,89 persen. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ketiga sektor tersebut

diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempertahankan sekaligus mendorong berputarnya roda perekonomian dari ketiga sektor ini.

Tabel 3.1.2
Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011
(%)

Sektor	2007	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	37,25	35,63	33,66	32,17	30,78
2. Pertambangan	1,72	2,02	2,33	2,36	2,49
3. Industri	30,16	29,29	28,88	28,05	27,03
4. Listrik dan air	0,34	0,31	0,29	0,27	0,29
5. Bangunan	6,02	7,58	8,24	8,98	10,16
6. Perdagangan	12,02	12,95	13,90	15,04	15,89
7. Angkutan	3,29	3,26	3,22	3,13	3,09
8. Keuangan	3,35	3,40	3,71	3,94	4,14
9. Jasa-Jasa	5,86	5,55	5,77	6,05	6,13
T o t a l	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Dari uraian di atas sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Riau. Di dalam sektor pertanian terdapat subsektor kehutanan, bila meneliti lebih dalam selama kurun waktu 2007-2011 ternyata sub sektor ini cenderung terus mengecil. Kontribusi selama tahun 2007 sebesar 11,88 persen dan kini selama tahun 2011 menjadi sebesar 9,62 persen.

Sementara itu subsektor perkebunan sebenarnya cenderung

membesar namun peristiwa melemahnya harga sawit bermula pada triwulan terakhir tahun 2008 hingga mencapai titik harga paling rendah pada sebagian waktu dalam tahun 2009 ternyata tergambar dari kontribusinya yang menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan kondisi harga sawit pada saat situasi stabil. Kontribusi subsektor ini tercatat dari tahun 2007 sebesar 19,02 persen, tahun 2008 sebesar 18,03 persen, tahun 2009 sebesar 16,47 persen, tahun 2010 sebesar 16,03 persen dan kemudian tahun 2011 sebesar 15,54 persen. Oleh karena begitu besarnya peranan kedua subsektor ini maka peranannya sangat memberi warna secara langsung pada kontribusi sektor pertanian.

Selanjutnya, besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Riau oleh karena industri pengolahan bahan kertas dan kertas, industri pengolahan kayu, dan industri pengolahan kelapa sawit sanggup menghasilkan nilai tambah yang cukup besar dan besarnya sangat dominan. Selama tahun 2011 kontribusi sektor industri pengolahan ini sebesar 27,03 persen.

Kemudian kontribusi terbesar berikutnya terhadap perekonomian bersumber dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 15,89 persen. Untuk subsektor perdagangan, hal ini terutama disebabkan oleh tingginya

kecepatan perputaran barang dalam perekonomian hingga ke konsumen akhir, baik itu produk baru maupun lama. Kondisi seperti terlihat nyata khususnya terjadi pada barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan HP. Selain itu, indikasi dilapangan terlihat nyata semakin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan baru yang begitu berperan menjadikan motor dalam mempercepat perputaran barang sehingga tercipta kemudahan bagi konsumen untuk memperolehnya. Kelancaran arus barang tersebut juga tidak terlepas dari keadaan sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Perkembangan konstruksi dalam perekonomian suatu wilayah tergambar dari perkembangan PDRB sektor bangunan. Pada tahun 2011 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 10,16 persen terhadap perekonomian Riau.

Untuk sektor lainnya yaitu sektor pertambangan non migas, meskipun sektor ini memiliki pertumbuhan cukup tinggi namun kontribusi dalam perekonomian sektor ini masih sangat kecil yakni hanya 2,49 persen saja. Hal ini barangkali oleh karena eksploitasi dan eksplorasi produksi komoditas batu bara masih baru.

Kemudian kondisi yang sama terjadi pada sektor listrik dan air bersih. Keterbatasan daya serta kurangnya sumber pembangkit listrik yang baru menyebabkan

kontribusi sektor listrik dan air bersih terhadap perekonomian sangat sulit berkembang. Pada tahun 2011 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,29 persen.

3.1.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan PDRB dan pendapatan per kapita Riau akan mencerminkan secara tak langsung seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk Riau. Bila disajikan secara berkala, data tersebut akan dapat menunjukkan gambaran perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke arah yang semakin membaik atau sebaliknya.

Data tentang PDRB dan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap besar-kecilnya nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita.

Pada publikasi kali ini penduduk pertengahan tahun selama tahun 2007-2011 mengacu pada level penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 beserta estimasinya. Secara nasional publikasi dari setiap daerah melakukan hal yang sama.

Tabel 3.1.3
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Tanpa Migas, 2007-2011
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2007	23,38	7,88
2008	28,78	8,22
2009	33,37	8,46
2010	38,74	8,78
2011	44,15	9,12
PENDAPATAN PER KAPITA		
2007	21,38	7,20
2008	26,31	7,51
2009	30,51	7,73
2010	35,42	8,03
2011	40,37	8,34

Sumber: BPS Provinsi Riau

Dari Tabel 3.1.3 terlihat bahwa PDRB per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan yang cukup nyata yaitu dari 23,38 juta rupiah di tahun 2007 naik menjadi 38,74 juta rupiah di tahun 2010 kemudian meningkat lagi menjadi 44,15 juta rupiah pada tahun 2011.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perkembangan subsektor perkebunan, subsektor industri pengolahan tanpa migas dan subsektor perdagangan, jasa dan restoran. Disamping itu kemajuan perkembangan sektor jasa-jasa juga sangat berperan besar.

Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga

konstan 2000, menunjukkan arah yang juga meningkat dari 7,88 juta rupiah di tahun 2007 naik menjadi 8,78 juta rupiah di tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 9,12 juta rupiah di tahun 2011. Peningkatan ini berarti bahwa kemampuan daya beli secara riil penduduk Riau selama periode tersebut semakin besar. Kemudian masih dari Tabel 3.1.3, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan per kapita Riau atas dasar harga berlaku selama periode 2007-2011 juga mengalami kenaikan, dari 23,38 juta rupiah di tahun 2007 menjadi 44,15 juta rupiah atau naik 1,89 kali pada tahun 2011.

Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita atas dasar harga konstan memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita yang juga mengalami kenaikan dari sebesar 7,20 juta rupiah di tahun 2007 menjadi 8,34 juta rupiah atau naik 1,15 persen pada tahun 2011.

3.2 PDRB Dengan Migas

Situasi perekonomian dengan migas meskipun tidak begitu berimbas langsung terhadap perekonomian masyarakat namun sangat bermanfaat sebagai bahan perbandingan guna melihat kondisi perkembangan sumber daya yang telah diproduksi dalam perekonomian suatu wilayah.

Secara nasional migas merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial dan menjadi andalan. Untuk Provinsi Riau kontribusi migas terhadap perekonomian juga sangat dominan.

Tabel 3.2.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas,
atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007-2011
(%)

Sektor	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	4,84	4,79	3,72	3,95	3,88
2.Pertambangan	-0,13	3,93	-0,02	1,43	2,61
3.Industri	8,63	7,18	5,02	6,69	6,93
4.Listrik dan air	5,62	6,86	3,17	5,59	6,85
5.Bangunan	11,65	11,14	8,77	8,84	12,77
6.Perdagangan	8,94	9,72	8,87	10,17	10,09
7.Angkutan	7,28	10,45	8,26	9,43	9,73
8.Keuangan	13,33	13,65	10,14	9,61	9,67
9.Jasa-Jasa	9,71	9,25	8,54	8,44	8,48
Total PDRB	3,41	5,65	2,97	4,17	5,01

Sumber: BPS Provinsi Riau

Minyak bumi dan Gas adalah salah satu bahan bakar yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi, antara lain untuk menggerakkan proses produksi di sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor transportasi.

Sangat kontradiktif sekali disaat kebutuhan akan migas terus meningkat seiring dengan keberhasilan dari kemajuan perekonomian namun kemampuan

produksi migas di Provinsi Riau senantiasa melemah sehingga berimbas semakin mengecilnya kontribusi migas terhadap perekonomian Riau.

3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Setelah memasukkan komoditas migas dalam perhitungan PDRB maka akan memperoleh keadaan kondisi perekonomian dengan migas. Kemudian turunannya bisa menyajikan gambaran tingkat kemajuan perekonomian dengan migas Riau. Selama kurun waktu 2007-2011 ternyata berfluktuasi. namun berkecenderungan terus melemah. Pada Tabel 3.2.1, terlihat jelas tentang laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mulai dari sebesar 3,41 persen pada tahun 2007, kemudian pertumbuhan terus melemah hingga menjadi 5,65 persen selama tahun 2008, tahun 2009 kembali melemah hingga mencapai 2,97 persen. Selanjutnya tahun 2010 kembali menguat hingga mencapai 4,18 persen dan terakhir tahun 2011 kembali menguat menjadi hanya sebesar 5,01 persen.

Semakin lemahnya tingkat produksi subsektor pertambangan migas merupakan faktor utama yang memicu rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan migas sehingga berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pada tahun 2007 tingkat produksi subsektor pertambangan sebesar

-0,41 persen. Selama periode 2008-2010 perkembangan subsektor pertambangan fluktuatif masing-masing sebesar 3,72 persen, -0,24 persen dan 1,29. Dan pada tahun 2011 ini terjadi pertumbuhan positif dan hanya sebesar 2,39 persen.

Kemudian pada sektor industri pengolahan selama tahun 2009 mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2008, dimana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,02 persen lebih lemah dari tahun yang tercatat sebesar 7,18 persen. Pada tahun 2009 tingkat produksi industri pengolah non migas lebih rendah dari tahun 2008. Ini merupakan dampak dari rendahnya permintaan CPO di pasaran global. Tingkat produksi industri pengolahan non migas pada tahun 2009 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36 persen, sedangkan tahun 2008 telah tumbuh sebesar 8,98 persen.

Dengan melihat lebih seksama secara umum Grafik 3.1 dan berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas senantiasa lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih stabil pada kisaran rata-rata di atas 8 persen dan hanya selama tahun 2009 ini pertumbuhan di atas 6 persen dan tahun 2010 di atas 7 persen, sementara

pertumbuhan ekonomi dengan migas senantiasa berfluktuatif tergantung dari tingkat kestabilan harga dan permintaan pasar dunia serta tingkat produksi yang didapatkan.

3.2.2 Kontribusi Sektoral

Perbedaan signifikan antara kontribusi sektoral perekonomian dengan migas dan perekonomian tanpa migas terdapat pada sektor yang memiliki unsur migas, yakni sektor pertambangan.

Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan sebesar 36,47 persen terhadap perekonomian Riau dengan migas dan pada tahun 2011 sebesar 37,42 persen, sedangkan dalam perekonomian tanpa migas kontribusinya hanya sebesar 2,36 persen pada tahun 2010 sedangkan tahun 2011 sebesar 2,49 persen..

Tabel 3.2.2
Distribusi PDRB Riau Dengan Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011
(%)

Sektor	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	20,76	19,22	20,28	19,97	18,87
2. Pertambangan	43,39	44,78	38,43	36,47	37,42
3. Industri	18,65	18,15	20,12	20,34	19,37
4. Listrik dan air	0,19	0,17	0,18	0,17	0,18
5. Bangunan	3,35	4,09	4,97	5,57	6,23
6. Perdagangan	6,70	6,99	8,37	9,34	9,74
7. Angkutan	1,83	1,76	1,94	1,94	1,89
8. Keuangan	1,87	1,83	2,24	2,45	2,54
9. Jasa-Jasa	3,26	3,00	3,48	3,76	3,76
T o t a l	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Sektor pertambangan berkontribusi sangat besar dalam perekonomian dengan migas oleh karena dukungan yang sangat besar daripada sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, selama tahun 2011 berkontribusi sebesar 35,90 persen.

Pada tahun sebelumnya, masih dalam kurun waktu 2007-2011 kontribusi subsektor pertambangan minyak dan gas lebih besar dari kontribusinya di tahun 2011. Pada tahun 2008 sempat berkontribusi sebesar 43,69 persen, sedangkan tahun 2007, 2009, dan 2010 masing-masing berkontribusi sebesar 42,43 persen, 37,03 persen, dan 35,00 persen.

Setelah mengamati satu sektor atau sub sektor ini terlihat jelas betapa perekonomian Riau sangat tergantung kepadanya, sehingga sektor ini diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Riau, yang tentunya perlu didukung dengan berbagai kebijakan kondusif dari *stakeholders*. Namun, perlu juga melakukan tindakan antisipasi guna mencari sumber daya ekonomi lain yang dapat dikembangkan di masa mendatang karena migas sebagai *unrenewable resources* tidak selamanya dapat diandalkan. Ini mulai terlihat dengan eksploitasi komoditas batu bara sebagai alternatif komoditas unggulan lain.

Pada Tabel 3.2.2, tampak bahwa selama periode 2007-2011 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

sekitar 35-43 persen lebih, sehingga memposisikan sektor ini setiap tahunnya sebagai sektor terbesar dalam berkontribusi terhadap perekonomian. Selanjutnya kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian dan sektor industri, selama tahun 2011 masing-masing berkontribusi sebesar 18,87 persen dan 19,37 persen. Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang pembentukan PDRB Riau dengan migas yakni sekitar 9,74 persen.

Dengan mencermatinya lebih mendalam ternyata perekonomian Riau mengarah pada perubahan struktur ekonomi yang positif. Sebelum kurun waktu tahun 2007-2011 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian selalu di atas 50 persen, namun dalam kurun waktu saat ini perannya secara perlahan mulai bergeser pada sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri pengolahan non migas) dan sektor pertanian (khususnya subsektor perkebunan).

Secara ekonomi regional kedua sektor ini lebih menyentuh ke masyarakat dan unggul dari sisi akses nilai tambahnya karena berpeluang besar berkontribusi langsung ke masyarakat tempatan. Perubahan ini bagus karena di masa mendatang ketergantungan terhadap minyak bumi tidak baik sebab secara perlahan kandungan minyak bumi akan habis.

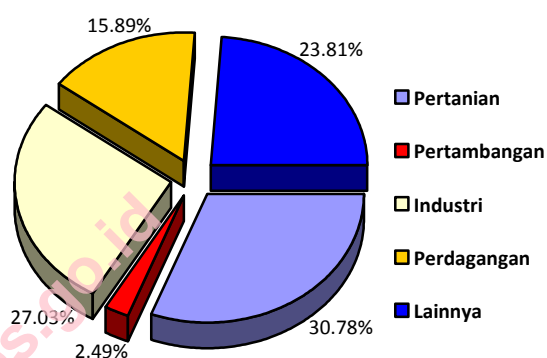
Sama halnya dengan kontribusi ekonomi tanpa migas dimana sektor yang memiliki peran paling rendah dalam perekonomian selama periode 2007-2011 adalah sektor listrik dan air bersih sebesar 0,27 persen. Sementara itu sektor ini peranannya terhadap pembentukan PDRB Riau dengan migas lebih kecil lagi, pada tahun 2011 hanya sebesar 0,18 persen. Dengan kemampuan peranan dari sektor ini yang sangat rendah, baik pada struktur ekonomi tanpa maupun dengan migas maka diharapkan muncul kebijakan yang dapat mendorong kemajuannya mengingat keberadaanya menjadi salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan.

Kemudian mobilitas komoditas, tingkat produksi dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan faktor produksi akan sangat tergantung pada sektor angkutan dan komunikasi. Sehingga sektor ini sangat berperan penting dalam bertugas mendistribusikan barang dan jasa dari suatu tempat (daerah) ke tempat tujuan (daerah lain) dengan aman dan efektif, dan juga sebagai sarana berkomunikasi antar pelaku ekonomi agar aktivitas ekonominya lancar dan efisien. Namun, melihat angka kontribusinya yang hanya dibawah 2 (dua) persen selama periode 2007-2011, artinya masih jauh dari harapan. Semoga dengan semakin pesatnya perekonomian di Riau, prasarana dan sarana jalan akan semakin baik. Sehingga distribusi barang melalui

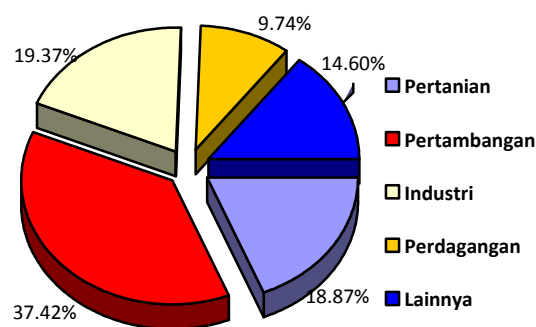
akses dari satu daerah ke daerah lain semakin bertambah lancar.

Grafik 3.2
Distribusi PDRB Riau atas Dasar
Harga Berlaku, 2011
(%)

A. Tanpa Migas



B. Dengan Migas



Secara umum selama kurun waktu tahun 2007-2011, peran sektor bangunan (konstruksi) pada perekonomian Riau dengan migas juga masih tergolong kecil, selama tahun 2007 kontribusinya sedikit berkembang dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 3,35 persen, tahun 2008

sebesar 4,09 persen, tahun 2009 sebesar 4,97 persen, tahun 2010 sebesar 5,57 persen dan terakhir tahun 2011 menembus angka sebesar 6,23 persen. Ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi Riau selama tahun-tahun terakhir berkembang dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun demikian program pemerintah guna mengejar ketertinggalan infrastruktur tetap harus terus menjadi prioritas.

Sektor keuangan juga tampaknya semakin stabil didalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Riau dengan migas. Semakin meningkatnya kepercayaan perbankan kepada pengusaha sektor riil dan masyarakat dengan memberikan akses kemudahan sehingga masyarakat dan pelaku sektor riil lebih berani dalam mengambil kredit melalui perbankan. Selain itu, adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih mempermudah proses memperoleh kredit bagi usaha kecil dan menengah.

Tampaknya perkembangan setiap sektor, baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi di dalam perekonomian Riau tanpa atau dengan migas semakin menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian Visi Riau 2020 yakni "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera Lahir

dan Bathin pada tahun 2020". Namun begitu hendaknya pemerintah tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Masih banyak pembenahan pada sektor-sektor tertentu yang harus dikerjakan dimasa yang akan datang.

3.2.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu ukuran makro tentang kemakmuran di suatu daerah maka PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk dianalisis. Pada Tabel 3.2.3 terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2007-2011. Sementara secara riil (atas dasar harga konstan) juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat selama periode 2007-2011.

Pada tahun 2007, PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku mencapai 41,96 juta rupiah meningkat menjadi 72,03 juta rupiah di tahun 2011. Sementara secara riil, PDRB per kapita Riau di tahun 2007 sebesar 17,23 juta rupiah menjadi 17,88 juta rupiah pada tahun 2011, atau naik sebesar 0,38 persen.

Sedangkan gejolak pendapatan per kapita tampak sama dengan kondisi PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun dilihat secara riilnya.

Tabel 3.23.
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Dengan Migas, 2007-2011
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2007	41,96	17,23
2008	53,34	17,58
2009	55,39	17,48
2010	62,41	17,64
2011	72,03	17,88
PENDAPATAN PER KAPITA		
2007	38,36	15,75
2008	48,76	16,07
2009	50,64	15,98
2010	57,06	16,13
2011	65,85	16,35

Sumber: BPS Provinsi Riau

Seiring dengan PDRB per kapita, selama tahun 2007-2011, pola pendapatan per kapita juga menunjukkan hal yang sama, yakni pada harga berlaku menunjukkan arah yang meningkat dari 38,36 juta rupiah di tahun 2007 menjadi 65,85 juta rupiah pada tahun 2011. Sementara secara riil, pendapatan per kapita Riau di tahun 2007 sebesar 15,75 juta rupiah menjadi 16,35 juta rupiah pada tahun 2011, atau selama lima tahun mengalami penambahan pendapatan sebanyak 0,6 juta rupiah.

4

Perkembangan PDRB

Antar Daerah

BAB IV

PERBANDINGAN PDRB ANTAR DAERAH

Perkembangan dan kemajuan perekonomian suatu wilayah dengan wilayah lainnya akan tergambar melalui data PDRB dari wilayah tersebut. Berdasarkan data PDRB tersebut dapat diturunkan dan akan diperoleh ukuran makro ekonomi suatu wilayah.

Dalam bab ini menyajikan pembahasan indikator makro ekonomi dari setiap provinsi se-Sumatera dan Indonesia. Beberapa ukuran makro yang dibahas adalah tingkat laju pertumbuhan, struktur perekonomian wilayah dan PDRB per kapita.

Perkembangan PDRB se-Sumatera

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi geografis Provinsi Riau berbatasan langsung dengan beberapa provinsi di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Selain itu, Riau juga berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Setelah Provinsi Kepulauan Riau berdiri sendiri, Provinsi Riau telah menyiapkan pelabuhan khusus sebagai tempat bongkar muat barang yang terletak di Kota Dumai. Ini menjadikan Provinsi

Riau via Kota Dumai sering kali menjadi daya tarik sebagai daerah jangkar untuk melakukan ekspor untuk asal barang berbagai daerah *hinterland*.

Selain dari pada itu, letak geografis Provinsi Riau termasuk dalam jalur lintas Sumatera yang banyak digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas barang dan jasa dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau sebaliknya.

Geografis Provinsi Riau yang begitu strategis menjadikan Provinsi Riau secara ekonomi sangat menguntungkan. Sebagai daerah persimpangan jalan dan jalur lintasan atau transit maka sudah barang tentu semakin mempertinggi frekwensi dan menciptakan kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat. Pada akhirnya akan berdampak langsung dan tidak langsung bagi terciptanya kegiatan produksi dan nilai tambah.

Pada masa yang lalu perekonomian Pulau Sumatera sangat didominasi oleh keberadaan Minyak dan Gas Bumi. Era saat ini dan dimasa mendatang sangat berpeluang besar perekonomian Sumatera juga akan ditopang oleh kemampuan produksi komoditi dari Kelapa Sawit dan CPO.

Peningkatan ekspor CPO dari Pelabuhan Dumai naik dari tahun ke tahun. Dengan demikian PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Medan bertekad menjadikan Dumai sebagai pelabuhan khusus “hub port” minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan menambah dermaga 400 meter lagi, sehingga menjadi sepanjang 800 meter. Dengan harapan seluruh CPO di Sumatera dapat terpusat melalui pelabuhan Dumai.

Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, di Riau terdapat dua wilayah yang dicanangkan untuk pengembangan klaster industri sawit berbasis pertanian. Kedua wilayah tersebut yaitu daerah Dumai dan Kuala Enok di Indragiri Hilir (Inhil).

Kota Dumai sangat realitis untuk dikembangkan sebagai klaster industri, khususnya industri turunan dari sawit. Infrastruktur yang ada juga sudah memadai.

Pada Kawasan Industri Dumai (KID) terdapat salah satu perusahaan Wilmar Group yang memiliki pabrik biodiesel terbesar dunia berkapasitas satu juta metrik ton. Kemudian tiga BUMN Perkebunan, PTPN III, IV, dan V menginvestasikan Rp400 miliar untuk membangun tiga pabrik biofuel yang menghasilkan biodiesel dan bioethanol dan mulai dibangun semester I 2010.

Gubernur Riau menyebutkan, saat ini Riau baru memiliki 155 pabrik kelapa

sawit (PKS). Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanyak 16 PKS jika dibandingkan luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau yang mencapai 2,3 juta ha.

Dampak positif dari hal di atas sangat mempengaruhi provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dari tahun ke tahun luas lahan sawit dari provinsi tersebut terus meningkat.

4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat laju pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kondisi kestabilan perekonomian dalam suatu wilayah maupun antar wilayah.

Selama kurun waktu tahun 2007-2011 berbagai fenomena perekonomian tergambar melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara wilayah provinsi, Pulau Sumatera maupun Indonesia.

Dampak kenaikan BBM di tahun 2005 menciptakan krisis ekonomi. Pada waktu pertengahan tahun 2006 kondisi perekonomian pulih kembali tergambar dari indikator makro ekonominya. Proses kegiatan produksi dan penciptaan nilai tambah di hampir seluruh provinsi di Indonesia berkembang lagi seperti sediakala.

Selama tahun 2007 perekonomian secara umum berkembang stabil, kemudian memasuki akhir tahun 2008 kembali terjadi krisis global dimana titik

episentrum krisis bermula dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Bangsa Indonesia, dengan berbekal pengalaman krisis perekonomian sebelumnya, ternyata perekonomian Indonesia dalam situasi krisis global kali ini tetap bergerak kondusif terbukti dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008 masih bergerak positif.

Tabel 4.1.1 menjelaskan juga bahwa selama tahun 2008 semua provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan ekonomi positif meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2006, 2007 dan 2008, Provinsi Riau ternyata masih menjadi motor pemicu paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian se-Sumatera. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tertinggi yakni mencapai 8,06 persen.

Dampak krisis pada tahun 2008 sangat terasa pada masa perjalanan perekonomian selama tahun 2009. Seluruh provinsi se-Sumatera mencatat pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya, demikian juga tingkat pertumbuhan pada tingkat nasional.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 6,56 persen berada dibawah tingkat pertumbuhan tertinggi yang berasal dari Provinsi Jambi tercatat sebesar 6,99 persen.

Selanjutnya pada tahun 2010 perekonomian mulai membaik dan situasi

krisis ekonomi mulai sirna. Seluruh provinsi se-Sumatera menciptakan pertumbuhan lebih tinggi dari tahun 2009.

Pada tahun 2010 Provinsi Riau menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,16 persen berada setingkat di bawah Provinsi Kepulauan Riau yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,53 persen. Berikutnya diikuti Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,94 persen, Provinsi Jambi sebesar 6,79 persen, Sumatera Utara sebesar 6,36 persen. Selanjutnya untuk provinsi yang lain tingkat pertumbuhannya berada lebih rendah namun seluruhnya masih di atas 5 persen.

Tabel 4.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas
Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga
Konstan 2000, 2007-2011
(%)

PROVINSI	2007	2008	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	7,23	1,92	3,97	5,32	5,89
2. Sumut	6,90	6,39	5,07	6,35	6,58
3. Sumbar	6,34	6,88	4,28	5,93	6,22
4. Riau	8,25	8,06	6,56	7,16	7,63
5. Jambi	6,58	7,37	6,99	6,83	6,94
6. Sumsel	8,04	6,31	5,06	6,98	8,03
7. Bengkulu	6,46	5,75	5,62	6,06	6,40
8. Lampung	6,14	5,42	5,42	5,99	6,40
9. Kep.Babel	5,37	3,93	3,98	6,03	6,47
10. Kepri	7,55	7,19	3,66	7,53	6,94
SUMATERA	7,09	6,25	5,07	6,46	6,74
INDONESIA	6,95	6,47	5,00	6,60	6,95

Sumber: BPS Provinsi Riau

Selama kurun waktu 2007-2011, tingkat pertumbuhan ekonomi Riau tersebut senantiasa lebih tinggi dari pertumbuhan se-Sumatera dan nasional, seperti pada tahun 2010 tingkat pertumbuhan se-Sumatera tercatat sebesar 6,46 persen dan Indonesia tercatat sebesar 6,60 persen

Dengan demikian secara umum dalam kurun waktu 2007-2011 laju pertumbuhan ekonomi Riau masih sangat diperhitungkan bila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Sumatera.

Selain itu, berbagai hubungan kerjasama serta kesepahaman yang dilakukan oleh para petinggi se-Sumatera turut mendongkarak perekonomian Riau dan memantapkan kualitas pemerataan perekonomian se-Sumatera. Keunggulan lain bagi Provinsi Riau yang didukung oleh letak geografis adalah jalinan kerjasama dengan negara tetanga seperti Malaysia dan Singapura masih terus berjalan dan senantiasa dibina agar semakin berkualitas terhadap perekonomian Riau. Harapan Provinsi Riau ke depan agar dapat menjadi motor di dalam rangka memajukan perekonomian se-Sumatera. Ini tidak terlepas dari upaya Pemprov Riau dalam mewujudkan Visi Riau 2020.

Saat ini terus berproses dan berlangsung pembangunan infrastruktur baru. Diantaranya adalah proses peningkatan pelayanan bandar udara

seiring dengan kebutuhan pelayanan prima untuk para penumpang dan barang melalui angkutan udara yang tumbuh sangat pesat. Perencanaan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dipercepat masuk dalam agenda perencanaan pembangunan nasional, seiring dengan peningkatan kualitas pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan internasional dan perdagangan bebas.

Dari data historis selama periode 2007-2011 dan berbagai kebijakan pada penjelasan di atas memberikan sinyal kondusif pada perekonomian Provinsi Riau dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu bukan suatu yang mustahil bila banyak para investor dari berbagai negara banyak yang berminat untuk menanamkan modalnya di Riau

4.2 Kontribusi PDRB

Perkembangan perekonomian dari setiap provinsi di Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional dapat dilihat melalui kontribusi PDRB-nya. Kontribusi Provinsi se-Sumatera terhadap penciptaan ekonomi nasional (total 33 provinsi seluruh Indonesia) relatif besar.

Besaran kontribusi PDRB se-Sumatera berkisar dari 16,91 persen hingga 18,25 persen. Dampak krisis selama tahun 2008 sangat dirasakan pada tahun 2009 sehingga kontribusi PDRB se-Sumatera pada tahun tersebut hanya sebesar 16,91

persen. Kontribusi terbesar terjadi selama tahun 2007 tercatat sebesar 18,25 persen. Secara lebih rinci dapat dilihat pada pada Tabel 4.1.2.

Secara umum perekonomian dari setiap provinsi se-Sumatera berkembang cukup baik. Sementara itu series besaran kontribusi dari masing-masing provinsi sangat beragam. Dari Tabel 4.1.2. menginformasikan bahwa pada umumnya besaran kontribusi PDRB dari provinsi se-Sumatera cenderung mengecil. Khusus pada Provinsi Riau, Jambi dan Lampung kontribusinya cenderung terus membesar. Potret kecenderungan kontribusi provinsi se-Sumatera ini menjelaskan bahwa meskipun perkembangan perekonomian suatu provinsi berkinerja baik belum tentu kontribusinya bergerak membesar karena sangat tergantung juga dengan perkembangan PDRB provinsi lain se-Indonesia.

Selain itu besaran kontribusi terhadap perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang ada, kondisi infrastruktur, daya modal, dan kualitas sumber daya manusianya. Kesenjangan yang tinggi dari setiap provinsi akan dapat dipastikan kontribusi PDRB semakin bervariasi baik antar provinsi maupun antar pulau.

Selama periode 2007-2011, Provinsi Sumatera Utara memberikan peran terbesar terhadap perekonomian

nasional. Perekonomian Sumatera Utara senantiasa berperan di atas 4,5 persen.

Sementara itu, Bengkulu menduduki peringkat terendah dalam memberikan kontribusinya terhadap ekonomi nasional yakni hanya mampu mencapai di bawah 0,38 persen selama tahun 2011.

Tabel 4.1.2
Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku 2007-2011 (%)

PROVINSI	2007	2008	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	1,41	1,22	1,14	1,09	1,30
2. Sumut	5,10	4,79	4,56	4,62	5,71
3. Sumbar	1,69	1,60	1,49	1,47	1,80
4. Riau	3,31	3,37	3,48	3,62	4,60
5. Jambi	0,74	0,71	0,72	0,76	0,96
6. Sumsel	2,12	2,01	1,92	1,90	2,44
7. Bengkulu	0,36	0,34	0,31	0,30	0,38
8. Lampung	1,68	1,63	1,69	1,79	2,31
9. Kep.Babel	0,49	0,47	0,44	0,42	0,54
10. Kepri	1,34	1,22	1,15	1,12	1,36
SUMATERA	18,25	17,36	16,91	17,10	21,39
LAINNYA	81,75	82,64	83,09	82,90	78,61
TOTAL 33 PROVINSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Provinsi Riau berkontribusi selama tahun 2011 sebesar 4,60 persen yang berarti berada pada urutan ke dua setelah Sumatera Utara, sedangkan urutan ke tiga adalah Sumatera Selatan. Perkembangan kontribusi Riau sangat berbeda dengan Sumatera Utara maupun Sumatera Selatan

dimana peranan perekonomian Riau terlihat cenderung meningkat, seperti tergambar pada dua tahun sebelumnya tercatat sebesar 3,48 persen pada tahun 2009 naik menjadi 3,62 persen pada tahun 2010.

Perjalanan perekonomian yang kondusif ini merupakan indikasi bahwa peran perekonomian Provinsi Riau semakin diperhitungkan dalam kancan perekonomian nasional dan regional se-Sumatera. Kemudian agar senantiasa berprediket baik tersebut selayaknya harus tiada henti memperhatikan berbagai faktor pendukung dari kemapanan perekonomian, diantaranya terus meningkatkan dan memelihara kondisi dari infrastruktur yang ada, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan senantiasa berinovasi dan melakukan terobosan kebijakan-kebijakan pada sektor yang strategis guna lebih mengoptimalkan lagi daya gali terhadap potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga harapan Riau yang tertuang dalam Visi Riau 2020 semakin dapat diwujudkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat namun sekaligus dapat menjadi stimulus untuk pemacu pembangunan perekonomian di Bumi Lancang Kuning.

4.3 PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai

sisi baik dari sisi kesejahteraan rakyat (kesra) maupun ekonomi. Beberapa indikator dapat dijadikan ukuran kemakmuran misalnya bidang kesehatan seperti indikator angka harapan hidup, apabila angka harapan hidup meningkat maka dapat dikatakan di daerah itu kemakmuran meningkat pula. Sedangkan dari sisi ekonomi biasanya kemakmuran suatu daerah diukur melalui indikator makro ekonomi seperti PDRB per kapita. Dengan penyajian series angka PDRB per kapita dapat diikuti perkembangan atas kemakmuran di suatu daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perlakuan serentak untuk seluruh provinsi se-Indonesia, dimana penduduk pertengahan tahun yang digunakan pada publikasi tahun ini adalah mengacu pada level penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2010 yang diestimasi mudur ke dalam series 2005-2010.

Dari Tabel 4.1.3 tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Sumatera pada tahun 2007 sebesar 13,44 juta rupiah lalu meningkat menjadi sebesar 20,89 juta rupiah pada tahun 2011, sehingga ada peningkatan sebesar 155,43 persen dalam kurun waktu empat tahun. Begitu pula pada periode yang sama, perkembangan secara riil yang dicerminkan oleh PDRB per kapita atas

dasar harga konstan, juga mengalami peningkatan, pada tahun 2007 PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar

6,95 juta rupiah naik menjadi 8,22 juta rupiah di tahun 2011, ada kenaikan sebesar 118,27 persen.

Tabel 4.1.3
PRDB Per Kapita Tanpa Migas menurut Provinsi se-Sumatera, 2007-2011
(Juta Rupiah)

ROVINSI	ATAS DASAR HARGA BERLAKU					ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000				
	2007	2008	2009	2010 *)	2011 **)	2007	2008	2009	2010 *)	2011 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. NAD	11,78	12,57	13,30	14,38	15,59	6,17	6,15	6,26	6,46	6,70
2. Sumut	14,33	16,67	18,23	21,07	23,97	7,87	8,29	8,62	9,08	9,95
3. Sumbar	12,81	15,00	16,02	18,00	20,17	7,05	7,44	7,66	8,02	8,24
4. Riau	23,38	28,78	33,37	38,74	44,15	7,88	8,22	8,46	8,78	9,12
5. Jambi	9,11	10,60	12,16	14,58	16,60	4,44	4,65	4,85	5,07	5,29
6. Sumsel	10,59	12,38	13,49	15,09	17,76	5,95	6,22	6,42	6,75	7,17
7. Bengkulu	7,87	8,97	9,42	10,51	12,14	4,30	4,48	4,69	4,86	5,09
8. Lampung	8,09	9,72	11,54	13,94	16,50	4,39	4,57	4,76	4,99	5,26
9. Kep. Babel	15,52	18,07	18,84	20,51	39,61	8,27	8,42	8,49	8,74	9,04
10. Kepri	32,47	35,14	36,75	39,61	42,50	22,55	23,04	22,77	23,44	23,84
SUMATERA	13,44	15,72	17,45	20,01	20,89	6,95	7,26	7,48	7,84	8,22

Sumber: BPS Provinsi Riau

Sementara itu PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yang mencapai sebesar 44,15 juta rupiah, menempatkan Riau berada pada urutan pertama disusul oleh Kepulauan Riau kemudian pada posisi ketiga sampai kelima adalah Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Posisi Riau yang berada di urutan pertama sebagai akibat meningkatnya aktivitas ekonomi di Riau sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk masih tergolong kecil, namun begitu akibat pesatnya perkembangan

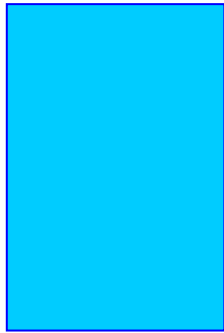
perekonomian di Riau maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi, karena Riau dipandang sebagai wilayah tujuan alternatif untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Riau, diharapkan akan mendongkrak lebih tinggi lagi kemakmuran masyarakat Riau secara nyata.

Namun dilihat secara riil melalui angka PDRB per kapita Riau harga konstan di tahun 2011 mencapai sebesar

9,12 juta rupiah, yang menempatkan posisi Riau berada pada urutan ketiga sama seperti tahun sebelumnya setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Bahkan angka PDRB per kapita Riau tersebut lebih tinggi dari rata-rata se-

Sumatera yang hanya mencapai 8,22 juta rupiah. Hal ini menandakan daya beli masyarakat Riau masih lebih baik dari rata-rata se-Sumatera pada periode tersebut.

<http://riau.bps.go.id>



Lampiran

Tabel-tabel Pokok

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	43.595.169,01	53.137.563,80	60.270.256,01	69.025.079,71	77.985.164,51
a. Tanaman Bahan Makanan	2.437.302,65	2.797.048,05	3.062.559,19	3.359.165,83	3.841.320,92
b. Tanaman Perkebunan	22.257.311,01	26.879.914,74	29.478.569,61	34.384.625,55	39.363.582,52
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.198.936,50	1.642.452,16	2.142.803,53	2.515.639,60	2.881.355,05
d. Kehutanan	13.899.720,42	17.185.486,64	20.082.118,08	22.314.716,66	24.387.522,92
e. Perikanan	3.801.898,43	4.632.662,20	5.504.205,61	6.450.932,06	7.511.383,10
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	91.119.826,29	123.781.863,82	114.203.564,32	126.047.287,18	154.687.230,78
a. Minyak dan Gas Bumi	89.103.779,09	120.771.330,59	110.038.218,46	120.976.278,63	148.376.123,35
b. Pertambangan tanpa Migas	1.410.745,53	2.072.244,81	2.917.000,99	3.469.704,72	4.205.534,07
c. Penggalian	605.301,67	938.288,43	1.248.344,87	1.601.303,83	2.105.573,36
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	39.156.003,58	50.179.230,71	59.796.961,91	70.309.300,89	80.086.270,21
a. Industri Migas	3.863.797,55	6.503.557,17	8.097.487,24	10.132.344,70	11.588.672,71
b. Industri Tanpa Migas	35.292.206,03	43.675.673,53	51.699.474,67	60.176.956,19	68.497.597,50
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	392.735,09	461.086,39	525.583,52	584.546,11	730.300,74
a. Listrik	314.804,19	371.703,55	412.666,05	453.231,08	559.275,84
b. Air Bersih	77.930,90	89.382,84	112.917,47	131.315,02	171.024,91
5. BANGUNAN	7.043.077,64	11.318.251,44	14.758.030,96	19.262.905,24	25.752.361,41
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	14.064.410,65	19.317.092,67	24.878.634,72	32.276.354,84	40.269.373,00
a. Perdagangan Besar dan Eceran	13.089.032,72	18.047.848,10	23.301.759,60	30.411.083,51	38.052.722,77
b. Hotel	586.083,53	775.688,89	953.800,95	1.114.612,28	1.327.416,15
c. Restoran	389.294,41	493.555,68	623.074,18	750.659,05	889.234,08
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3.853.213,88	4.867.262,36	5.762.017,91	6.719.791,07	7.828.802,11
a. Pengangkutan	3.356.896,30	4.261.882,92	5.001.031,16	5.788.309,20	6.712.588,91
1. Angkutan Darat	2.152.635,90	2.772.726,35	3.206.673,84	3.676.470,99	4.234.354,82
2. Angkutan Laut	608.772,19	757.773,67	889.612,73	1.039.169,06	1.202.742,44
3. Angkutan Udara	189.128,55	247.246,84	314.276,96	380.194,27	447.594,15
4. Jasa Penunjang Angkutan	406.359,65	484.136,06	590.467,63	692.474,87	827.897,50
b. Komunikasi	496.317,58	605.379,44	760.986,75	931.481,87	1.116.213,20
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	3.924.150,41	5.068.118,69	6.644.795,85	8.453.374,03	10.481.366,60
a. Bank	2.068.992,84	2.565.037,80	3.654.311,00	4.704.470,51	5.964.742,62
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	257.051,89	312.664,78	367.977,25	435.716,82	522.085,97
c. Sewa Bangunan	1.448.121,54	1.960.509,08	2.362.577,29	2.947.806,12	3.554.989,49
d. Jasa Perusahaan	149.984,14	229.907,04	259.930,31	365.380,58	439.548,52
9. JASA - JASA	6.853.973,75	8.279.660,08	10.333.183,11	12.982.674,73	15.529.253,44
a. Pemerintahan Umum	5.111.541,73	6.097.615,26	7.705.200,35	9.802.066,64	11.793.521,01
b. Swasta	1.742.432,02	2.182.044,82	2.627.982,77	3.180.608,09	3.735.732,43
1. Sosial Kemasyarakatan	128.756,79	181.824,27	229.185,09	277.690,57	330.639,23
2. Hiburan dan rekreasi	226.044,25	310.564,20	381.592,80	465.143,50	563.056,12
3. Perorangan dan Rumah tangga	1.387.630,98	1.689.656,34	2.017.204,88	2.437.774,03	2.842.037,08
PDRB TERMASUK MIGAS	210.002.560,30	276.400.129,95	297.173.028,31	345.661.313,79	413.350.122,80
PDRB TANPA MIGAS	117.034.983,66	149.125.242,19	179.037.322,61	214.552.690,46	253.385.326,75

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	14.785.911,40	15.494.292,46	16.071.126,47	16.706.357,97	17.353.807,55
a. Tanaman Bahan Makanan	1.768.512,67	1.809.453,28	1.836.552,10	1.903.316,26	1.996.863,83
b. Tanaman Perkebunan	5.622.057,76	6.071.166,19	6.439.653,53	6.914.991,06	7.554.914,22
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	751.979,61	813.625,48	866.741,31	912.993,57	976.598,26
d. Kehutanan	5.186.666,49	5.231.586,91	5.301.012,57	5.249.511,33	4.968.342,43
e. Perikanan	1.456.694,87	1.568.460,61	1.627.166,96	1.725.545,74	1.857.088,81
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	45.125.692,40	46.897.464,66	46.887.752,15	47.563.626,32	48.804.471,93
a. Minyak dan Gas Bumi	44.480.426,90	46.135.193,43	46.024.638,76	46.616.507,03	47.732.565,80
b. Pertambangan tanpa Migas	323.161,62	411.963,38	483.336,57	527.383,85	576.484,19
c. Penggalian	322.103,88	350.307,85	379.776,83	419.735,44	495.421,94
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9.246.973,72	9.910.769,31	10.408.040,64	11.104.279,60	11.873.821,60
a. Industri Migas	2.312.072,47	2.353.257,90	2.369.653,91	2.449.166,28	2.518.297,12
b. Industri Tanpa Migas	6.934.901,25	7.557.511,42	8.038.386,73	8.655.113,32	9.355.524,48
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	185.050,79	197.745,09	204.021,91	215.418,61	230.184,80
a. Listrik	157.539,15	169.069,83	174.472,34	184.785,25	197.637,23
b. Air Bersih	27.511,65	28.675,26	29.549,56	30.633,35	32.547,57
5. BANGUNAN	2.674.930,31	2.972.880,21	3.233.711,46	3.519.496,47	3.968.815,42
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6.840.260,85	7.504.882,30	8.170.775,01	9.001.431,20	9.909.550,43
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6.613.065,87	7.254.200,20	7.899.455,25	8.708.055,90	9.590.292,78
b. Hotel	115.369,99	126.417,86	136.786,83	147.588,45	160.170,20
c. Restoran	111.824,99	124.264,24	134.532,94	145.786,84	159.087,44
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.331.648,28	2.575.353,68	2.788.135,53	3.050.959,99	3.347.837,63
a. Pengangkutan	2.010.195,81	2.194.880,05	2.337.423,70	2.510.960,09	2.709.113,82
1. Angkutan Darat	1.352.923,62	1.468.888,44	1.565.293,22	1.678.081,62	1.810.834,91
2. Angkutan Laut	345.590,28	375.253,63	394.729,70	422.705,14	454.265,86
3. Angkutan Udara	147.439,15	169.285,57	183.342,10	200.138,46	216.202,06
4. Jasa Penunjang Angkutan	164.242,76	181.452,40	194.058,68	210.034,87	227.810,99
b. Komunikasi	321.452,47	380.473,63	450.711,83	539.999,90	638.723,81
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	1.011.841,54	1.149.980,23	1.266.639,45	1.388.321,99	1.522.585,83
a. Bank	320.483,32	391.264,51	451.161,39	507.336,20	571.968,85
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	72.074,44	79.180,92	84.429,41	91.269,65	99.197,36
c. Sewa Bangunan	554.668,27	608.389,88	653.949,66	706.387,73	760.604,67
d. Jasa Perusahaan	64.615,51	71.144,91	77.098,99	83.328,41	90.814,95
9. JASA - JASA	4.010.950,18	4.382.013,88	4.756.033,97	5.157.606,38	5.594.838,47
a. Pemerintahan Umum	3.063.274,58	3.345.185,05	3.635.690,78	3.933.991,21	4.261.703,77
b. Swasta	947.675,60	1.036.828,82	1.120.343,19	1.223.615,17	1.333.134,70
1. Sosial Kemasyarakatan	73.138,11	79.706,45	87.669,16	95.936,80	104.179,96
2. Hiburan dan rekreasi	107.512,53	117.990,81	130.158,52	142.700,58	155.923,59
3. Perorangan dan Rumah tangga	767.024,96	839.131,57	902.515,51	984.977,80	1.073.031,15
PDRB TERMASUK MIGAS	86.213.259,46	91.085.381,81	93.786.236,58	97.707.498,51	102.605.913,65
PDRB TANPA MIGAS	39.420.760,09	42.596.930,48	45.391.943,91	48.641.825,21	52.355.050,73

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	20,76	19,22	20,28	19,97	18,87
a. Tanaman Bahan Makanan	1,16	1,01	1,03	0,97	0,93
b. Tanaman Perkebunan	10,60	9,73	9,92	9,95	9,52
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,57	0,59	0,72	0,73	0,70
d. Kehutanan	6,62	6,22	6,76	6,46	5,90
e. Perikanan	1,81	1,68	1,85	1,87	1,82
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	43,39	44,78	38,43	36,47	37,42
a. Minyak dan Gas Bumi	42,43	43,69	37,03	35,00	35,90
b. Pertambangan tanpa Migas	0,67	0,75	0,98	1,00	1,02
c. Penggalan	0,29	0,34	0,42	0,46	0,51
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	18,65	18,15	20,12	20,34	19,37
a. Industri Migas	1,84	2,35	2,72	2,93	2,80
b. Industri Tanpa Migas	16,81	15,80	17,40	17,41	16,57
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,19	0,17	0,18	0,17	0,18
a. Listrik	0,15	0,13	0,14	0,13	0,14
b. Air Bersih	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
5. BANGUNAN	3,35	4,09	4,97	5,57	6,23
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,70	6,99	8,37	9,34	9,74
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6,23	6,53	7,84	8,80	9,21
b. Hotel	0,28	0,28	0,32	0,32	0,32
c. Restoran	0,19	0,18	0,21	0,22	0,22
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,83	1,76	1,94	1,94	1,89
a. Pengangkutan	1,60	1,54	1,68	1,67	1,62
1. Angkutan Darat	1,03	1,00	1,08	1,06	1,02
2. Angkutan Laut	0,29	0,27	0,30	0,30	0,29
3. Angkutan Udara	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20
b. Komunikasi	0,24	0,22	0,26	0,27	0,27
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	1,87	1,83	2,24	2,45	2,54
a. Bank	0,99	0,93	1,23	1,36	1,44
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13
c. Sewa Bangunan	0,69	0,71	0,80	0,85	0,86
d. Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11
9. JASA - JASA	3,26	3,00	3,48	3,76	3,76
a. Pemerintahan Umum	2,43	2,21	2,59	2,84	2,85
b. Swasta	0,83	0,79	0,88	0,92	0,90
1. Sosial Kemasyarakatan	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
2. Hiburan dan rekreasi	0,11	0,11	0,13	0,13	0,14
3. Perorangan dan Rumahtangga	0,66	0,61	0,68	0,71	0,69
PDRB TERMASUK MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN^f	17,15	17,01	17,14	17,10	16,91
a. Tanaman Bahan Makanan	2,05	1,99	1,96	1,95	1,95
b. Tanaman Perkebunan	6,52	6,67	6,87	7,08	7,36
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,87	0,89	0,92	0,93	0,95
d. Kehutanan	6,02	5,74	5,65	5,37	4,84
e. Perikanan	1,69	1,72	1,73	1,77	1,81
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	52,34	51,49	49,99	48,68	47,56
a. Minyak dan Gas Bumi	51,59	50,65	49,07	47,71	46,52
b. Pertambangan tanpa Migas	0,37	0,45	0,52	0,54	0,56
c. Penggalian	0,37	0,38	0,40	0,43	0,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10,73	10,88	11,10	11,36	11,57
a. Industri Migas	2,68	2,58	2,53	2,51	2,45
b. Industri Tanpa Migas	8,04	8,30	8,57	8,86	9,12
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
a. Listrik	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
b. Air Bersih	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5. BANGUNAN	3,10	3,26	3,45	3,60	3,87
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	7,93	8,24	8,71	9,21	9,66
a. Perdagangan Besar dan Eceran	7,67	7,96	8,42	8,91	9,35
b. Hotel	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16
c. Restoran	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,70	2,83	2,97	3,12	3,26
a. Pengangkutan	2,33	2,41	2,49	2,57	2,64
1. Angkutan Darat	1,57	1,61	1,67	1,72	1,76
2. Angkutan Laut	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
3. Angkutan Udara	0,17	0,19	0,20	0,20	0,21
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22
b. Komunikasi	0,37	0,42	0,48	0,55	0,62
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	1,17	1,26	1,35	1,42	1,48
a. Bank	0,37	0,43	0,48	0,52	0,56
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
c. Sewa Bangunan	0,64	0,67	0,70	0,72	0,74
d. Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
9. JASA - JASA	4,65	4,81	5,07	5,28	5,45
a. Pemerintahan Umum	3,55	3,67	3,88	4,03	4,15
b. Swasta	1,10	1,14	1,19	1,25	1,30
1. Sosial Kemasyarakatan	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
2. Hiburan dan rekreasi	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
3. Perorangan dan Rumah tangga	0,89	0,92	0,96	1,01	1,05
PDRB TERMASUK MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 5. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	37,25	35,63	33,66	32,17	30,78
a. Tanaman Bahan Makanan	2,08	1,88	1,71	1,57	1,52
b. Tanaman Perkebunan	19,02	18,03	16,47	16,03	15,54
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,02	1,10	1,20	1,17	1,14
d. Kehutanan	11,88	11,52	11,22	10,40	9,62
e. Perikanan	3,25	3,11	3,07	3,01	2,96
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,72	2,02	2,33	2,36	2,49
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	1,21	1,39	1,63	1,62	1,66
c. Penggalian	0,52	0,63	0,70	0,75	0,83
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	30,16	29,29	28,88	28,05	27,03
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	30,16	29,29	28,88	28,05	27,03
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,34	0,31	0,29	0,27	0,29
a. Listrik	0,27	0,25	0,23	0,21	0,22
b. Air Bersih	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
5. BANGUNAN	6,02	7,78	8,24	8,98	10,16
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	12,02	12,95	13,90	15,04	15,89
a. Perdagangan Besar dan Eceran	11,18	12,10	13,02	14,17	15,02
b. Hotel	0,50	0,52	0,53	0,52	0,52
c. Restoran	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3,29	3,26	3,22	3,13	3,09
a. Pengangkutan	2,87	2,86	2,79	2,70	2,65
1. Angkutan Darat	1,84	1,86	1,79	1,71	1,67
2. Angkutan Laut	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47
3. Angkutan Udara	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,35	0,32	0,33	0,32	0,33
b. Komunikasi	0,42	0,41	0,43	0,43	0,44
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	3,35	3,40	3,71	3,94	4,14
a. Bank	1,77	1,72	2,04	2,19	2,35
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,22	0,21	0,21	0,20	0,21
c. Sewa Bangunan	1,24	1,31	1,32	1,37	1,40
d. Jasa Perusahaan	0,13	0,15	0,15	0,17	0,17
9. JASA - JASA	5,86	5,55	5,77	6,05	6,13
a. Pemerintahan Umum	4,37	4,09	4,30	4,57	4,65
b. Swasta	1,49	1,46	1,47	1,48	1,47
1. Sosial Kemasyarakatan	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13
2. Hiburan dan rekreasi	0,19	0,21	0,21	0,22	0,22
3. Perorangan dan Rumah tangga	1,19	1,13	1,13	1,14	1,12
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 6. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	37,51	36,37	35,41	34,35	33,15
a. Tanaman Bahan Makanan	4,49	4,25	4,05	3,91	3,81
b. Tanaman Perkebunan	14,26	14,25	14,19	14,22	14,43
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,91	1,91	1,91	1,88	1,87
d. Kehutanan	13,16	12,28	11,68	10,79	9,49
e. Perikanan	3,70	3,68	3,58	3,55	3,55
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,64	1,79	1,90	1,95	2,05
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0,82	0,97	1,06	1,08	1,10
c. Penggalian	0,82	0,82	0,84	0,86	0,95
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	17,59	17,74	17,71	17,79	17,87
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	17,59	17,74	17,71	17,79	17,87
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44
a. Listrik	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38
b. Air Bersih	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
5. BANGUNAN	6,79	6,98	7,12	7,24	7,58
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	17,35	17,62	18,00	18,51	18,93
a. Perdagangan Besar dan Eceran	16,78	17,03	17,40	17,90	18,32
b. Hotel	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31
c. Restoran	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5,91	6,05	6,14	6,27	6,39
a. Pengangkutan	5,10	5,15	5,15	5,16	5,17
1. Angkutan Darat	3,43	3,45	3,45	3,45	3,46
2. Angkutan Laut	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87
3. Angkutan Udara	0,37	0,40	0,40	0,41	0,41
4. Jasa Penunjang Angkutan	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44
b. Komunikasi	0,82	0,89	0,99	1,11	1,22
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	2,57	2,70	2,79	2,85	2,91
a. Bank	0,81	0,92	0,99	1,04	1,09
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
c. Sewa Bangunan	1,41	1,43	1,44	1,45	1,45
d. Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
9. JASA - JASA	10,17	10,29	10,48	10,60	10,69
a. Pemerintahan Umum	7,77	7,85	8,01	8,09	8,14
b. Swasta	2,40	2,43	2,47	2,52	2,55
1. Sosial Kemasyarakatan	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
2. Hiburan dan rekreasi	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30
3. Perorangan dan Rumah tangga	1,95	1,97	1,99	2,02	2,05
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

TABEL 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	447,67	545,65	618,90	708,80	800,81
a. Tanaman Bahan Makanan	167,53	192,26	210,51	230,90	264,04
b. Tanaman Perkebunan	662,95	800,64	878,05	1.024,18	1.172,48
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	238,65	326,93	426,53	500,74	573,54
d. Kehutanan	391,43	483,96	565,53	628,40	686,77
e. Perikanan	435,59	530,77	630,62	739,09	860,59
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	203,67	276,67	255,26	281,73	345,75
a. Minyak dan Gas Bumi	199,88	270,92	246,84	271,38	332,84
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	375,88	582,65	775,19	994,37	1.307,51
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	636,49	815,67	972,01	1.142,89	1.301,82
a. Industri Migas	151,99	255,82	318,52	398,56	455,85
b. Industri Tanpa Migas	977,71	1.209,96	1.432,25	1.667,10	1.897,61
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	344,80	404,80	461,43	513,19	641,16
a. Listrik	339,47	400,83	445,00	488,75	603,10
b. Air Bersih	368,12	422,21	533,38	620,28	807,86
5. BANGUNAN	479,79	770,35	1.005,36	1.312,24	1.754,32
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	396,08	544,00	700,63	908,96	1.134,06
a. Perdagangan Besar dan Eceran	381,23	525,67	678,69	885,76	1.108,33
b. Hotel	966,30	1.278,91	1.572,57	1.837,70	2.188,56
c. Restoran	683,78	866,91	1.094,40	1.318,50	1.561,90
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	329,92	416,74	493,35	575,36	670,32
a. Pengangkutan	287,42	364,91	428,20	495,60	574,74
1. Angkutan Darat	296,60	382,04	441,83	506,56	583,43
2. Angkutan Laut	287,65	358,06	420,35	491,02	568,31
3. Angkutan Udara	370,86	484,82	616,26	745,51	877,67
4. Jasa Penunjang Angkutan	525,40	625,96	763,44	895,33	1.070,43
b. Komunikasi	485,70	592,43	744,71	911,56	1.092,34
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	1.022,92	1.321,13	1.732,13	2.203,57	2.732,22
a. Bank	6.951,40	8.618,01	12.277,75	15.806,07	20.040,33
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	633,74	770,85	907,21	1.074,22	1.287,16
c. Sewa Bangunan	516,22	698,87	842,20	1.050,82	1.267,26
d. Jasa Perusahaan	457,67	701,56	793,17	1.114,95	1.341,28
9. JASA - JASA	302,94	365,95	456,71	573,82	686,38
a. Pemerintahan Umum	290,62	346,69	438,09	557,31	670,53
b. Swasta	345,94	433,22	521,76	631,48	741,69
1. Sosial Kemasyarakatan	341,86	482,76	608,51	737,29	877,88
2. Hiburan dan rekreasi	373,15	512,67	629,93	767,85	929,48
3. Perorangan dan Rumahtangga	342,26	416,75	497,54	601,27	700,98
PDRB TERMASUK MIGAS	301,83	397,26	427,11	496,80	594,09
PDRB TANPA MIGAS	521,18	664,08	797,29	955,44	1128,37

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	151,83	159,11	165,03	171,55	178,20
a. Tanaman Bahan Makanan	121,56	124,38	126,24	130,83	137,26
b. Tanaman Perkebunan	167,46	180,84	191,81	205,97	225,03
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	149,68	161,95	172,53	181,73	194,39
d. Kehutanan	146,06	147,33	149,28	147,83	139,91
e. Perikanan	166,90	179,70	186,43	197,70	212,77
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	100,86	104,82	104,80	106,31	109,08
a. Minyak dan Gas Bumi	99,78	103,49	103,24	104,57	107,07
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	200,02	217,53	235,83	260,64	307,64
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	150,31	161,10	169,18	180,50	193,01
a. Industri Migas	90,95	92,57	93,21	96,34	99,06
b. Industri Tanpa Migas	192,12	209,37	222,69	239,78	259,18
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	162,46	173,61	179,12	189,12	202,09
a. Listrik	169,88	182,32	188,14	199,26	213,12
b. Air Bersih	129,96	135,45	139,58	144,70	153,74
5. BANGUNAN	182,22	202,52	220,29	239,76	270,37
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	192,63	211,35	230,10	253,50	279,07
a. Perdagangan Besar dan Eceran	192,61	211,29	230,08	253,63	279,33
b. Hotel	190,21	208,43	225,53	243,33	264,08
c. Restoran	196,42	218,27	236,30	256,07	279,43
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	199,64	220,51	238,72	261,23	286,65
a. Pengangkutan	172,12	187,93	200,13	214,99	231,96
1. Angkutan Darat	186,41	202,39	215,67	231,21	249,51
2. Angkutan Laut	163,30	177,31	186,52	199,73	214,65
3. Angkutan Udara	289,11	331,95	359,51	392,45	423,94
4. Jasa Penunjang Angkutan	212,36	234,61	250,91	271,56	294,55
b. Komunikasi	314,58	372,34	441,07	528,45	625,06
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	263,76	299,77	330,18	361,90	396,90
a. Bank	1.076,76	1.314,57	1.515,81	1.704,55	1.921,70
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	177,69	195,21	208,15	225,02	244,56
c. Sewa Bangunan	197,72	216,88	233,12	251,81	271,14
d. Jasa Perusahaan	197,17	217,10	235,27	254,28	277,12
9. JASA - JASA	177,28	193,68	210,21	227,96	247,29
a. Pemerintahan Umum	174,17	190,19	206,71	223,67	242,30
b. Swasta	188,15	205,85	222,43	242,94	264,68
1. Sosial Kemasyarakatan	194,19	211,63	232,77	254,72	276,61
2. Hiburan dan rekreasi	177,48	194,78	214,86	235,57	257,40
3. Perorangan dan Rumahtangga	189,19	206,97	222,60	242,94	264,66
PDRB TERMASUK MIGAS	123,91	130,91	134,79	140,43	147,47
PDRB TANPA MIGAS	175,55	189,69	202,14	216,61	233,15

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 9. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	120,12	121,89	113,42	114,53	112,98
a. Tanaman Bahan Makanan	107,92	114,76	109,49	109,68	114,35
b. Tanaman Perkebunan	120,41	120,77	109,67	116,64	114,48
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	118,30	136,99	130,46	117,40	114,54
d. Kehutanan	123,23	123,64	116,86	111,12	109,29
e. Perikanan	116,65	121,85	118,81	117,20	116,44
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	129,38	135,85	92,26	110,37	122,72
a. Minyak dan Gas Bumi	128,80	135,54	91,11	109,94	122,65
b. Pertambangan tanpa Migas	176,33	146,89	140,77	118,95	121,21
c. Penggalian	134,92	155,01	133,04	128,27	131,49
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	121,18	128,15	119,17	117,58	113,91
a. Industri Migas	125,70	168,32	124,51	125,13	114,37
b. Industri Tanpa Migas	120,70	123,75	118,37	116,40	113,83
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	115,59	117,40	113,99	111,22	124,93
a. Listrik	117,26	118,07	111,02	109,83	123,40
b. Air Bersih	109,33	114,69	126,33	116,29	130,24
5. BANGUNAN	165,38	160,56	130,51	130,52	133,69
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	125,80	137,35	128,79	129,74	124,76
a. Perdagangan Besar dan Eceran	126,39	137,89	129,11	130,51	125,13
b. Hotel	117,99	132,35	122,96	116,86	119,09
c. Restoran	119,06	126,78	126,24	120,48	118,46
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	119,81	126,32	118,38	116,62	116,50
a. Pengangkutan	119,79	126,96	117,34	115,74	115,97
1. Angkutan Darat	120,44	128,81	115,65	114,65	115,17
2. Angkutan Laut	119,96	124,48	117,40	116,81	115,74
3. Angkutan Udara	128,76	130,73	127,11	120,97	117,73
4. Jasa Penunjang Angkutan	112,70	119,14	121,96	117,28	119,56
b. Komunikasi	119,90	121,97	125,70	122,40	119,83
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	125,21	129,15	131,11	127,22	123,99
a. Bank	123,60	123,98	142,47	128,74	126,79
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	119,58	121,63	117,69	118,41	119,82
c. Sewa Bangunan	127,84	135,38	120,51	124,77	120,60
d. Jasa Perusahaan	133,21	153,29	113,06	140,57	120,30
9. JASA - JASA	116,08	120,80	124,80	125,64	119,62
a. Pemerintahan Umum	113,02	119,29	126,36	127,21	120,32
b. Swasta	126,10	125,23	120,44	121,03	117,45
1. Sosial Kemasyarakatan	122,73	141,22	126,05	121,16	119,07
2. Hiburan dan rekreasi	132,77	137,39	122,87	121,90	121,05
3. Perorangan dan Rumahtangga	125,40	121,77	119,39	120,85	116,58
PDRB TERMASUK MIGAS	125,70	131,62	107,52	116,32	119,58
PDRB TANPA MIGAS	123,43	127,42	120,06	119,84	118,10

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 10. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN.	104,84	104,79	103,72	103,95	103,88
a. Tanaman Bahan Makanan	102,53	102,31	101,50	103,64	104,91
b. Tanaman Perkebunan	107,04	107,99	106,07	107,38	109,25
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	107,48	108,20	106,53	105,34	106,97
d. Kehutanan	102,21	100,87	101,33	99,03	94,64
e. Perikanan	107,75	107,67	103,74	106,05	107,62
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	99,87	103,93	99,98	101,44	102,61
a. Minyak dan Gas Bumi	99,59	103,72	99,76	101,29	102,39
b. Pertambangan tanpa Migas	140,70	127,48	117,33	109,11	109,31
c. Penggalian	111,72	108,76	108,41	110,52	118,03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	108,63	107,18	105,02	106,69	106,93
a. Industri Migas	101,07	101,78	100,70	103,36	102,82
b. Industri Tanpa Migas	111,41	108,98	106,36	107,67	108,09
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	105,62	106,86	103,17	105,59	106,85
a. Listrik	106,05	107,32	103,20	105,91	106,96
b. Air Bersih	103,25	104,23	103,05	103,67	106,25
5. BANGUNAN	111,65	111,14	108,77	108,84	112,77
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	108,94	109,72	108,87	110,17	110,09
a. Perdagangan Besar dan Eceran	108,92	109,69	108,89	110,24	110,13
b. Hotel	109,08	109,58	108,20	107,90	108,52
c. Restoran	110,35	111,12	108,26	108,37	109,12
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	107,28	110,45	108,26	109,43	109,73
a. Pengangkutan	105,50	109,19	106,49	107,42	107,89
1. Angkutan Darat	104,13	108,57	106,56	107,21	107,91
2. Angkutan Laut	107,19	108,58	105,19	107,09	107,47
3. Angkutan Udara	110,21	114,82	108,30	109,16	108,03
4. Jasa Penunjang Angkutan	109,47	110,48	106,95	108,23	108,46
b. Komunikasi	119,94	118,36	118,46	119,81	118,28
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	113,33	113,65	110,14	109,61	109,67
a. Bank	121,14	122,09	115,31	112,45	112,74
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	109,98	109,86	106,63	108,10	108,69
c. Sewa Bangunan	109,73	109,69	107,49	108,02	107,68
d. Jasa Perusahaan	112,84	110,11	108,37	108,08	108,98
9. JASA - JASA	109,71	109,25	108,54	108,44	108,48
a. Pemerintahan Umum	109,39	109,20	108,68	108,20	108,33
b. Swasta	110,77	109,41	108,05	109,22	108,95
1. Sosial Kemasyarakatan	109,20	108,98	109,99	109,43	108,59
2. Hiburan dan rekreasi	110,60	109,75	110,31	109,64	109,27
3. Perorangan dan Rumah tangga	110,95	109,40	107,55	109,14	108,94
PDRB TERMASUK MIGAS	103,41	105,65	102,97	104,18	105,01
PDRB TANPA MIGAS	108,25	108,06	106,56	107,16	107,63

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 11. INDEKS IMPLISIT PDRB PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	294,84	342,95	375,02	413,17	449,38
a. Tanaman Bahan Makanan	137,82	154,58	166,76	176,49	192,37
b. Tanaman Perkebunan	395,89	442,75	457,77	497,25	521,03
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	159,44	201,87	247,23	275,54	295,04
d. Kehutanan	267,99	328,49	378,84	425,08	490,86
e. Perikanan	260,99	295,36	338,27	373,85	404,47
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	201,92	263,94	243,57	265,01	316,95
a. Minyak dan Gas Bumi	200,32	261,78	239,09	259,51	310,85
b. Pertambangan tanpa Migas	436,54	503,02	603,51	657,91	729,51
c. Penggalian	187,92	267,85	328,70	381,50	425,01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	423,45	506,31	574,53	633,17	674,48
a. Industri Migas	167,11	276,36	341,72	413,71	460,18
b. Industri Tanpa Migas	508,91	577,91	643,16	695,28	732,16
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	212,23	233,17	257,61	271,35	317,27
a. Listrik	199,83	219,85	236,52	245,27	282,98
b. Air Bersih	283,27	311,71	382,13	428,67	525,46
5. BANGUNAN	263,30	380,38	456,38	547,32	648,87
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	205,61	257,39	304,48	358,57	406,37
a. Perdagangan Besar dan Eceran	197,93	248,79	294,98	349,23	396,78
b. Hotel	508,00	613,59	697,29	755,22	828,75
c. Restoran	348,13	397,18	463,14	514,90	558,96
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	165,26	188,99	206,66	220,25	233,85
a. Pengangkutan	166,99	194,17	213,95	230,52	247,78
1. Angkutan Darat	159,11	188,76	204,86	219,09	233,83
2. Angkutan Laut	176,15	201,94	225,37	245,84	264,77
3. Angkutan Udara	128,28	146,05	171,42	189,97	207,03
4. Jasa Penunjang Angkutan	247,41	266,81	304,27	329,70	363,41
b. Komunikasi	154,40	159,11	168,84	172,50	174,76
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERU	387,82	440,71	524,60	608,89	688,39
a. Bank	645,59	655,58	809,98	927,29	1.042,84
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	356,65	394,87	435,84	477,40	526,31
c. Sewa Bangunan	261,08	322,25	361,28	417,31	467,39
d. Jasa Perusahaan	232,12	323,15	337,14	438,48	484,00
9. JASA - JASA	170,88	188,95	217,26	251,72	277,56
a. Pemerintahan Umum	166,87	182,28	211,93	249,16	276,73
b. Swasta	183,86	210,45	234,57	259,94	280,22
1. Sosial Kemasyarakatan	176,05	228,12	261,42	289,45	317,37
2. Hiburan dan rekreasi	210,25	263,21	293,18	325,96	361,11
3. Perorangan dan Rumahtangga	180,91	201,36	223,51	247,50	264,86
PDRB TERMASUK MIGAS	243,58	303,45	316,86	353,77	402,85
PDRB TANPA MIGAS	296,89	350,08	394,43	441,09	483,97

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 12. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	210.002.560,30	276.400.129,95	297.173.028,31	345.661.313,79	413.350.122,80
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	13.083.159,51	17.219.728,10	18.513.879,66	21.534.699,85	25.751.712,65
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	196.919.400,79	259.180.401,86	278.659.148,65	324.126.613,94	387.598.410,15
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	4.935.060,17	6.495.403,05	6.983.566,17	8.123.040,87	9.713.727,89
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	191.984.340,62	252.684.998,80	271.675.582,49	316.003.573,07	377.884.682,27
6. Penduduk Pertengahan Tahun	5.005.121	5.182.337	5.365.358	5.538.367	5.738.543
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	41.957.539,15	53.335.035,90	55.387.362,47	62.412.135,89	72.030.500,22
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	38.357.582,29	48.758.889,82	50.635.126,77	57.057.174,63	65.850.283,30

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 13. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	86.213.259,46	91.085.381,81	93.786.236,58	97.707.498,51	102.605.913,65
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	5.371.086,06	5.674.619,29	5.842.882,54	6.087.177,16	6.392.348,42
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	80.842.173,40	85.410.762,52	87.943.354,04	91.620.321,36	96.213.565,23
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	2.026.011,60	2.140.506,47	2.203.976,56	2.296.126,22	2.411.238,97
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	78.816.161,80	83.270.256,05	85.739.377,48	89.324.195,14	93.802.326,26
6. Penduduk Pertengahan Tahun	5.005.121	5.182.337	5.365.358	5.538.367	5.738.543
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	17.225.010,04	17.576.120,93	17.479.958,76	17.641.932,81	17.880.133,28
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	15.747.104,18	16.068.089,75	15.980.178,30	16.128.254,98	16.346.017,84

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 14. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	117.034.983,66	149.125.242,19	179.037.322,61	214.552.690,46	253.385.326,75
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	7.291.279,48	9.290.502,59	11.154.025,20	13.366.632,62	15.785.905,86
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	109.743.704,18	139.834.739,61	167.883.297,41	201.186.057,85	237.599.420,89
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	2.750.322,12	3.504.443,19	4.207.377,08	5.041.988,23	5.954.555,18
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	106.993.382,06	136.330.296,41	163.675.920,33	196.144.069,62	231.644.865,71
6. Penduduk Pertengahan Tahun	5.005.121	5.182.337	5.365.358	5.538.367	5.738.543
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	23.383.047,81	28.775.674,41	33.369.128,88	38.739.341,48	44.154.993,13
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	21.376.782,31	26.306.721,55	30.506.057,63	35.415.505,98	40.366.494,72

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 15. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2007-2011**

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	39.420.760,09	42.596.930,48	45.391.943,91	48.641.825,21	52.355.050,73
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	2.455.913,35	2.653.788,77	2.827.918,11	3.030.385,71	3.261.719,66
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	36.964.846,74	39.943.141,71	42.564.025,80	45.611.439,50	49.093.331,07
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	926.387,86	1.001.027,87	1.066.710,68	1.143.082,89	1.230.343,69
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	36.038.458,88	38.942.113,84	41.497.315,12	44.468.356,61	47.862.987,38
6. Penduduk Pertengahan Tahun	5.005.121	5.182.337	5.365.358	5.538.367	5.738.543
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	7.876.085,33	8.219.637,29	8.460.189,22	8.782.701,69	9.123.404,80
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	7.200.317,21	7.514.392,41	7.734.304,98	8.029.145,88	8.340.616,66

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru-Riau 28131

Telepon : (0761) 23042 – 21336, Fax : (0761) 21336

E-mail : bps1400@bps.go.id